

LAPORAN KINERJA TRIWULAN II

TA. 2024

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR

KATA PENGANTAR

Sebagai wujud penerapan tata kepemerintahan yang baik (*good governance*) dan akuntabel serta untuk memenuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN) dan Reformasi Birokrasi (RB) Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur menyusun Laporan Kinerja Triwulan II Tahun 2024. Laporan Kinerja merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dan dikaitkan dengan Rencana Strategis Badan penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur tahun 2021-2026.

Renstra BPBD menjadi dokumen acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan unit kerja BPBD pada periode tahun 2021 sampai dengan 2026. Untuk mewujudkan tujuan yang tertuang dalam Renstra BPBD Kab. Luwu Timur, dijabarkan dalam 2 (dua) sasaran strategis, yaitu Meningkatnya Ketahanan Daerah menghadapi bencana dengan indikator Indeks Ketahanan Daerah dan Meningkatnya Layanan SPM Sub Urusan Bencana dengan indikator Indeks Capaian SPM Sub Urusan Bencana dan 1 (satu) sasaran pendukung yaitu Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah dengan indikator Nilai SAKIP. Dalam pencapaian sasaran perlu menyesuaikan dan mempertimbangkan tantangan-tantangan yang ada dalam pencapaian target agar pelaksanaan berjalan lebih efektif dan efisien.

Penyusunan dan penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang berisi tentang prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan merupakan kewajiban setiap SKPD sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja ini dapat dijadikan bahan dalam peningkatan pelayanan dan bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan program dan kegiatan ditahun mendatang.

Laporan Kinerja Triwulan II Tahun 2024 ini merupakan cerminan prestasi serta evaluasi terhadap berbagai program kerja pada Triwulan II Tahun Anggaran 2024, sebagai perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan ataupun kegagalan dari pelaksanaan visi, misi dan strategi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Demikian Laporan Kinerja ini disampaikan. Terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan laporan tersebut, semoga dapat bermanfaat, khususnya bagi BPBD Kabupaten Luwu Timur dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Malili, 10 Juli 2024

KEPALA PELAKSANA,

<u>. APR/L, M. Kes</u>

Wu TMP 9670707 200012 1 002



RINGKASAN EKSEKUTIF

VISI

"Kabupaten Luwu Timur yang Berkelanjutan dan Lebih Maju Berlandaskan Nilai Agama dan Budaya"

MISI

MISI Ke- 3 RPJMD

"Menyediakan infrastruktur daerah yang memadai dan lingkungan yang berkualitas"

MISI Ke- 4 RPJMD

"Menciptakan kepemerintahan dan pelayanan publik yang lebih baik"

SASARAN STRATEGIS/PROGRAM/KEGIATAN

NOTIFIKASI

Tercapai

Tidak Tercapai

CAPAIAN KINERJA

- I. Meningkatnya ketahanan daerah menghadapi bencana
- II. Meningkatnya layanan SPM sub urusan bencana
- III. Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah
- a. Meningkatnya upaya penyebaran informasi tentang bagian wilayah kabupaten/kota rawan bencana, kepada Warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana dan yang berpotensi terpapar bencana
- Meningkatnya upaya pencegahan dan mitigasi untuk mengurangi potensi korban jiwa, kerugian ekonomi dan kerusakan lingkungan akibat bencana di daerah rawan bencana
- C. Terselenggaranya penanganan penyelamatan dan evakuasi korban bencana serta pemenuhan kebutuhan dasar bagi korban bencana



1. Indeks Ketahanan Daerah (IKD) = 0,60 (98,36%)

1. Indeks Capaian SPM Sub Urusan bencana = 37,52 %



- 1. NILAI SAKIP = 86,00(A)
- 1. Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana = 65,63 %
- Persentase warga negara yang meperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiapsiagaan terhadap bencana = 13,05%
- 3. Persentase warga negara yang meperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana yang responsif gender = 33,87%

d. Terciptanya sistem pelayanan administrasi perkantoran yang memadai	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar = 85,51%
Terlaksananya pelayanan informasi rawan bencana kepada warganegara yang berada dikawasan rawan bencana dan yang	Cakupan warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana = 0%
Terlaksananya pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan pemerintah dan warganegara untuk mengurangi dampak	Cakupan warga negara yang meperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiapsiagaan terhadap bencana = 0,08%
Terlaksananya pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana sesegera mungkin bencana	Cakupan warga negara yang meperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana yang responsif gender = 100%
Terlaksananya penataan sistem dasar penanggulangan bencana sesuai standar	Cakupan sistem dasar penanggulangan bencana sesuai SOP kebencanaan = 0%
Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun tepat	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu = 100%
Tersedianya laporan keuangan perangkat daerah	Persentase administrasi keuangan yang terselenggara dengan baik = 90,62%
7. Terlaksananya administrasi dan penatausahaan Barang Milik Daerah pada perangkat daerah	Persentase BMD yang diadministrasikan sesuai standar = 100%
Terlaksananya administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persentase Rata-rata Capaian kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah = 50%
Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah	Persentase Rata- Rata Capaian Kinerja administrasi umum Perangkat Daerah = 75,85%
Terpenuhinya kebutuhan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah	Persentase BMD-Perangkat Daerah penunjang yang terpenuhi = 100%
11. Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja jasa penunjang urusan pemerintahan daerah = 100,6%
12. Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang siap pakai	Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara dengan baik = 67,03%

DAFTAR ISI

		hal.
KATA PI	ENGANTAR	i
DAFTAR	ISI	iv
DAFTAR	TABEL	V
DAFTAR	GAMBAR	vii
DAFTAR	GRAFIK	viii
BAB I	PENDAHULUAN	
	1.1 Tugas dan Fungsi	1
	1.2 Struktur Organisasi	1
	1.3 Aspek Strategis Organisasi	4
	1.4 Isu Strategis/Permasalahan	6
	1.5 Sistematika Laporan	7
BAB II	PERENCANAAN KINERJA	
	A. Target Kinerja tahun 2021-2026	9
	1. Visi dan Misi	10
	2. Indikator Kinerja Sasaran	11
	B. Perjanjian Kinerja Tahun 2024	13
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA	
	3.1 Capaian Kinerja Organisasi	16
	3.2 Analis Capaian Kinerja	17
BAR IV	PENUTUP	73

DAFTAR TABEL

	•	ııaı.
Tabel 1	Tujuan, Sasaran, indikator kinerja sasaran, dan target kinerja sasaran RENSTRA BPBD Kabupaten Luwu Timur 2021-2026	12
Tabel 2	Perjanjian Kinerja Tahun 2024	13
Tabel 3	Program dan Pagu Anggaran Tahun 2024	14
Tabel 4	Tingkat Akuntabilitas Kinerja	16
Tabel 5	Pengukuran Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2024	17
Tabel 6	Hasil Penilaian Indeks Ketahanan Daerah Kab. Luwu Timur Tahun 2024	23
Tabel 7	Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan I tahun 2024 dengan tahun sebelumnya.	24
Tabel 8	Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 terhadap Target Jangka Menengah (2021 – 2026)	25
Tabel 9	Nilai Indeks Ketahanan Daerah (IKD) 24 Kab/Kota	26
Tabel 10	Pencapaian Kinerja dan Anggaran Triwulan I Tahun 2024	31
Tabel 11	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	32
Tabel 12	Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan I TA. 2024 dengan Tahun	
	Triwulan I Sebelumnya	36
Tabel 13	Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Jangka Menengah	37
Tabel 14	Realisasi Target SPM Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	38
Tabel 15	Alokasi Anggaran Bidang urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	39
Tabel 16	Kendala Permasalahan dan Solusi SPM urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	1 40
Tabel 17	Capaian Kinerja Kegiatan/Sub Kegiatan	50
Tabel 18	Capaian Kinerja Kegiatan/Sub Kegiatan	50
Tabel 19	Capaian Kinerja Kegiatan/Sub Kegiatan	52
Tabel 20	Capaian Indikator Kinerja Sasaran	53
Tabel 21	Perbandungan Target dan Realisasi dengan Tahun-Tahun sebelumnya	. 54
Tabel 22	Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 Terhadap Target Jangka Menengah (2021 - 2026)	55
Tabel 23	Pencapaian Kinerja dan Anggaran	57
Tabel 24	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	57
Tabel 25	Capaian Indikator Kinerja Program Pendukung	58
Tabel 26	Realisasi Anggaran Berdasarkan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Triwulan I Tahun 2024	64

Tabel 27	Permasalahan Solusi	70
----------	---------------------	----

DAFTAR GRAFIK

		nal.
Grafik 1	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024	2
Grafik 2	Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024	2
Grafik 3	Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1 Tahun 2024	18
Grafik 4	Prioritas penilaian Indeks Ketahanan Daerah Kab. Luwu Timur Tahun 2024	23
Grafik 5	Trend Nilai IRB Kabupaten Luwu Timur 2019 s.d 2023	28
Grafik 6	Trend Nilai IKD Kabupaten Luwu Timur 2018 s.d 2023	29
Grafik 7	Capaian Kinerja Indeks Capaian SPM Sub Urusan Bencana Triwulan I TA. 2024.	35
Grafik 8	Capaian Kinerja Program Penanggulangan Bencana Triwulan I Tahun 2024	43
Grafik 9	Nilai SAKIP Triwulan I TA. 2024	53
Grafik 10	Perbandingan Realisasi Anggaran Triwulan I Tahun 2024	63

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 TUGAS DAN FUNGSI

adan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), dipimpin oleh Kepala Badan yang secara *ex officcio* dijabat oleh Sekretaris Daerah Kabupaten yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

Berdasarkan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 74 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur. Berdasarkan peraturan tersebut, Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai Tugas dan fungsi sebagai berikut:

Tugas : membantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintah

daerah di bidang penanggulangan bencana daerah,

Fungsi : - Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan

bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat

dan tepat, efektif dan efisien;

- Pengorganisasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan

bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

1.2 STRUKTUR ORGANISASI

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur dibentuk melalui Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur sebagaimana terakhir diubah berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 74 Tahun 2021.

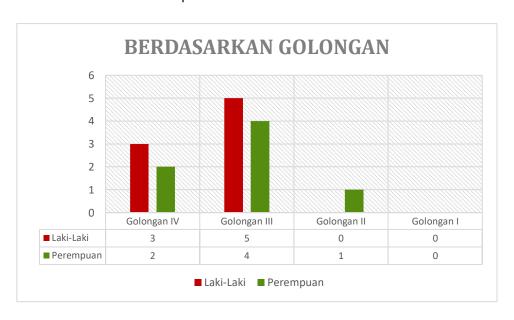
Sumber Daya Manusia (SDM)

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, berdasarkan Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 didukung dengan jumlah pegawai sebanyak 38 orang, terdiri dari Aparatur Sipil Negara (ASN) 14 orang, PPPK 1 org dan Tenaga Upah Jasa 23 orang (Tenaga Administrasi 1 orang, Cleaning Service 1 orang, Sopir 1 orang dan Tim Reaksi Cepat 21 orang). Struktur tingkat pendidikan SDM Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur tercantum pada diagram berikut:



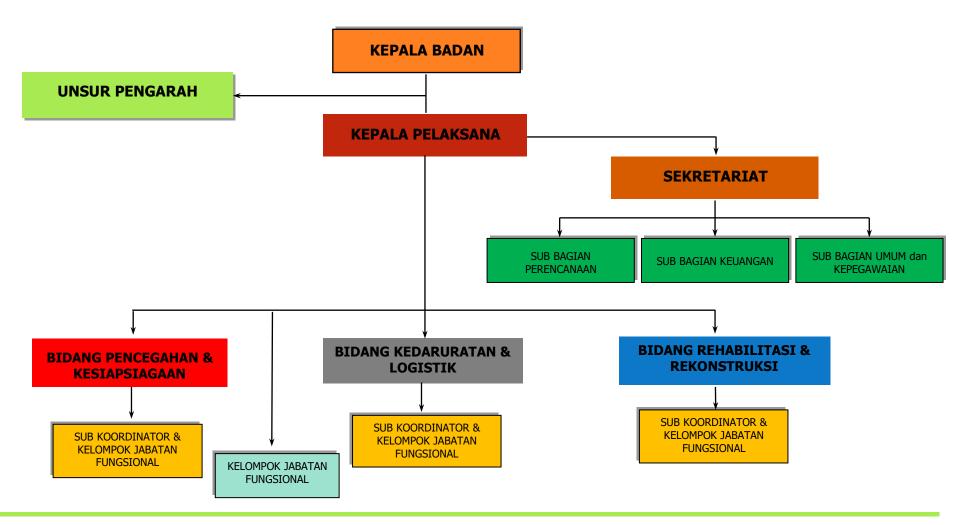
Grafik. 1

Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024



Grafik. 2Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024

Gambar 1Bagan Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024



1.3 ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) adalah Lembaga Pemerintah Non-Departemen yang melaksanakan tugas penanggulangan bencana di daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/ Kota dengan berpedoman pada kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana. BPBD dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008, menggantikan Satuan Koordinasi Pelaksana Penanganan Bencana (Satkorlak) di tingkat Provinsi dan Satuan Pelaksana Penanganan Bencana (Satlak PB) di tingkat Kabupaten / Kota, yang keduanya dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2005.

Oleh karena hal tersebut, pemerintah membuat Undang-Undang tentang penanggulangan bencana yang dituangkan pada Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Pasal 27 UU tersebut menegaskan bahwa setiap orang berkewajiban untuk melakukan kegiatan penanggulangan bencana. UU ini juga mengatur keterlibatan pihak swasta, lembaga-lembaga non-pemerintah dan lembaga internasional dalam penanggulangan bencana. Undang-Undang atau Peraturan ini dibuat sebagai payung hukum mengenai proses penyelenggaraan penanggulangan bencana di Indonesia. Penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan Undang-Undang ini dimulai dari prabencana, pada saat bencana hingga proses pemulihan pasca bencana diatur di dalamnya. BNPB dan BPBD dirancang untuk penanggulangan bencana secara menyeluruh yang merupakan perubahan dari pendekatan konvensional yaitu tanggap darurat menuju perspektif baru.Dimana perspektif ini memberi penekanan merata pada semua aspek penanggulangan bencana dan berfokus pada pengurangan resiko serta penanganan korban. Kinerja organisasi merupakan salah satu sorotan yang paling tajam dalam pelaksanaan pemerintahan menyangkut kesiapan, jumlah pendidikan dan profesionalisme. BPBD Kabupaten Luwu Timur sebagai salah satu organisasi pemerintahan yang berwenang penanggulangan bencana, memiliki peran dalam penyelenggaraan penanggulangan atas berbagai bencana di wilayah Kabupaten Luwu Timur. Pelaksanaan penanggulangan bencana yang dilakukan oleh BPBD Kabupaten Luwu Timur diperlukan kesiapan yang mantap demi terselenggaranya pelaksanaan pemerintahan yang baik.

Dalam penanganan bencana dibutuhkan kesiagaan dan kecepatan seluruh unsur aparat dari berbagai instansi tanpa terkecuali. Sehingga ketika bencana tiba sudah tidak perlu birokrasi adminitrasi, koordinasi dan himbauan lagi. Akan tetapi yang terpenting adalah aparat akan bisa hadir dengan cepat di tengah masyarakat ketika bencana terjadi hal itulah yang perlu dibenahi dari sekarang dan itu menjadi tugas BPBD yang bukan hanya sekedar menanggulangi saat terjadi bencana namun juga melakukan koordinasi mulai dari sebelum terjadi bencana, sampai pasca bencana.

1.4 ISU STRATEGIS/PERMASALAHAN

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur merupakan unsur pendukung dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2020 telah diatur tugas pokok dan fungsi dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur antara lain membantu Bupati dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan penanggulangan bencana serta berfungsi merumuskan kebijakan teknis penanggulangan bencana dengan memberikan dukungan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Dalam pelaksanaan tugasnya BPBD Kabupaten Luwu Timur mendukung dan mewujudkan tercapainya sasaran strategis Daerah Kabupaten Luwu Timur yaitu "Terpeliharanya kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana (S7)". Namun dalam pelaksanaan penanggulangan bencana di Kabupaten Luwu Timur masih terdapat permasalahan antara lain:

- 1. Belum optimalnya penerapan Standar Pelayanan Minimal pada sub urusan bencana:
- 2. Tingginya tingkat kerawanan bencana Kabupaten Luwu Timur
- Meningkatnya kerusakan lingkungan yang berdampak pada meningkatnya kejadian bencana setiap tahun
- 4. Belum optimalnya upaya pencegahan dan mitigasi dalam rangka pengurangan risiko bencana
- Belum optimalnya upaya kesiapsiagaan dan penanganan darurat untuk menghadapi bencana secara mandiri dan proaktif
- 6. Belum memadainya mekanisme pendukung dalam penyelenggaraan pemulihan dampak bencana
- 7. Keterbatasan sumber daya logistik dan peralatan
- 8. Belum optimalnya sinergitas dan kordinasi lintas sektor
- 9. Luasnya cakupan wilayah pelayanan penanggulangan bencana

1.5 SISTEMATIKA LAPORAN

Laporan Kinerja Triwulanan ini pada dasarnya adalah suatu media untuk mengkomunikasikan capaian kinerja BPBD Kabupaten Luwu Timur Triwulan II Tahun Anggaran 2024. Capaian Kinerja tersebut dibandingkan dengan Rencana Kinerja Tahun 2024 yang telah diselaraskan dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2024, yang merupakan tolok ukur keberhasilan organisasi.

Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja bagi perbaikan di masa datang. Artinya, terhadap capaian yang telah mencapai atau melebihi target (sudah baik) agar tetap dipertahankan, sedangkan terhadap capaian kinerja yang masih di bawah target untuk masa mendatang dapat dilakukan perbaikan melalui strategi-strategi yang lebih baik.

Memperhatikan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka Laporan Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur Triwulan II Tahun Anggaran 2024 ini disusun dengan sistematika penulisan dengan bagan sebagai berikut:

Referensi Bab

PENDAHULUAN

(memuat tentang gambaran umum organisasi dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama organisasi dan sistematika pelaporan dan sekilas pengantar lainnya)





PERENCANAAN KINERJA

(memuat tentang ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun bersangkutan)



Perjanjian Kinerja Tahun 2024





AKUNTABILITAS KINERJA

(memuat tentang capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi, analisis pencapaian kinerja sasaran dan analisis pencapaian kinerja keuangan)





PENUTUP

(Memuat tentang simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah-langkah dimasa mendatang yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja)



LAMPIRAN-LAMPIRAN



PERENCANAAN KINERJA



eningkatan kualitas sistem akuntabilitas selalu menjadi perhatian utama setiap perangkat daerah, termasuk BPBD. Peningkatan ini terlihat dari penajaman program pada Renstra 2021–2026.

Program pada Renstra BPBD periode 2021-2021 berbeda dari Renstra periode sebelumnya yaitu diselaraskan dengan Program Nasional yang berkaitan dengan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Urusan Bencana dan disesuaikan juga dengan Program Prioritas (KP1) Kepala Daerah. Berdasarkan Renstra BPBD 2021-2026, mencakup 2 (dua) sasaran utama yaitu Meningkatnya Ketahanan Daerah Menghadapi Bencana dan Meningkatnya Layanan SPM Sub Urusan Bencana.

A. TARGET KINERJA TAHUN 2021-2026

Penyusunan Renstra BPBD Kabupaten Luwu Timur yang mengacu pada RPJMD Kabupaten Luwu Timur. Hal ini merupakan upaya untuk mengefektifkan dan mengarahkan sumber daya BPBD dalam mewujudkan peran BPBP sebagai pelaku utama dalam penanggulangan bencana dan membantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang penanggulangan bencana daerah. Dalam melaksanakan tugas, BPBD menyelenggarakan dua fungsi utama yaitu Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien serta Pengorganisasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

Fungsi tersebut diformulasikan ke dalam tujuan dan sasaran BPBD dalam rangka mendukung Visi dan Misi Kepala Daerah dalam RPJMD 2021-2026. Visi yaitu keadaan umum yang diinginkan pada akhir tahun 2026 atau setelahnya dan misi atau rumusan umum tentang upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi, strategi atau program-program indikatif untuk mencapai visi dan misi.

1. Pernyataan Visi

Visi merupakan suatu keadaan atau harapan yang harus diwujudkan pada masa yang akan datang, dengan kata lain visi merupakan pandangan jauh ke depan, kemana dan bagaimana instansi pemerintah harus dibawa dan berkarya agar konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif serta produktif.

"Kabupaten Luwu Timur yang Berkelanjutan dan Lebih Maju Berlandaskan Nilai Agama dan Budaya"

2. Pernyataan Misi

Misi adalah segala sesuatu (strategi, tindakan) yang harus dilakukan untuk mewujudkan visi. Misi yang berkaitan dengan tugas dan fungsi BPBD Kabupaten Luwu Timur yaitu

MISI Ke- 3 RPJMD

"Menyediakan infrastruktur daerah yang memadai dan lingkungan yang berkualitas"

Sasaran 7 RPJMD

"Terpeliharanya kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana"

MISI Ke- 4 RPJMD

"Menciptakan kepemerintahan dan pelayanan publik yang lebih baik"

Sasaran 8 RPJMD

"Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan"

Sasaran 9 RPJMD

"Meningkatnya kualitas pelayanan publik"

3. Indikator Kinerja Sasaran

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulan atau bulanan. Sasaran yang efektif harus memenuhi kriteria spesifik dan dapat terukur. Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian sasaran yang telah ditetapkan. Penetapan Indikator Kinerja harus didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan.

Adapun hubungan antara tujuan, sasaran, Indikator Kinerja Tujuan dan Target Jangka Menengah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 – 2026 yang tertuang dalam RENSTRA yang berkaitan dengan Visi dan Misi yang diemban oleh BPBD Kab. Luwu Timur dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. Tujuan, Sasaran, indikator kinerja sasaran, dan target kinerja sasaran RENSTRA BPBD Kabupaten Luwu Timur 2021-2026

Indikator _				Indikator Kinerja	Kondi si		Target Kinerja Sasaran					Kondis	
No Tujuan	Tujuan	Tujuan	Target	Sasaran	sasaran	Awal 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Akhir 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Menurunkan risiko bencana daerah	Indeks Risiko Bencana (IRB)	202	Meningkatnya ketahanan daerah menghadapi bencana	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	0,42	0,43	0,44	0,45	0,46	0,48	0,50	0,50
2.	Meningkatkan penyelenggaraan SPM sub urusan bencana	Persentase pemenuhan Layanan SPM Sub Urusan Bencana(%)	100	Meningkatnya layanan SPM sub urusan bencana	Indeks Capaian SPM Sub Urusan bencana (%)	-	100	100	100	100	100	100	100
3.	Meningkatkan Tata Kelola pemerintahan yang berorientasi pelayanan publik	Indeks Reformasi Birokrasi (RB)	70(BB)	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	NILAI SAKIP	70	70	75	78	80	80	80	80

B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Pengukuran pencapaian tujuan sebagaimana ditetapkan dalam Renstra dilakukan melalui pengukuran pencapaian sasaran kegiatan dalam hal ini melalui pengukuran indikator kinerja kegiatan. Untuk menguatkan pencapaian sasaran strategis, di tahun 2024 disusun perjanjian kinerja perubahan sebagai dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu, dokumen penetapan kinerja memuat pernyataan dan lampiran formulir yang mencantumkan sasaran kegiatan, kegiatan, indikator kinerja, beserta target kinerja dan anggaran. Target kinerja yang ada dalam perjanjian menunjukkan komitmen dari pimpinan dan seluruh anggota organisasi untuk mencapai hasil yang diinginkan dari setiap sasaran sesuai indikator kinerja.

Perjanjian Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun Anggaran 2024 yang merupakan kesanggupan untuk melaksanakan kinerja, sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024, sebagaimana pada tabel berikut :

Tabel 2.
Perjanjian Kinerja Tahun 2024

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya ketahanan daerah menghadapi bencana	Indeks Ketahanan Daerah	0,61 (sedang)
2.	Meningkatnya layanan SPM sub urusan bencana	Indeks Capaian SPM Sub Urusan bencana (%)	100%
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	83,06 (A)

Penetapan kinerja dengan sasaran strategis dan indikator kinerja utama yang telah ditetapkan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2024 didukung dengan pembiayaan APBD Kabupaten Luwu Timur sebesar Rp. 5.172.606.050,- (Lima Milyar Seratus Tujuh Puluh Dua Juta Juta Enam Ratus Enam Ribu Lima Puluh Rupiah), terdiri dari belanja pegawai Rp 2.146.665.782,- belanja barang dan jasa Rp. 1.820.552.768,- dan belanja modal Rp 1.205.387.500,-.

Adapun program dan anggaran secara lengkap disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 3. Program dan Pagu Anggaran Tahun 2024

NO.	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	KET.
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	3.539.355.020,-	APBD
2	Program Penanggulangan Bencana	1.633.251.030,-	APBD
	JUMLAH	5.172.606.050,-	

BAB 3

AKUNTABILITAS KINERJA

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dikatakan mampu mengkomunikasikan capaian kinerja unit kerja secara jujur, objektif, akurat dan transparan dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, apabila dalam penyajiannya memenuhi prinsip-prinsip dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yaitu *pertama*, Prinsip Lingkup Pertanggungjawaban, yang mengandung pengertian bahwa hal-hal yang dilaporkan harus proporsional dengan lingkup kewenangan dan tanggungjawab masing-masing dan memuat baik mengenai kegagalan maupun keberhasilan, kedua, Prinsip Prioritas, mengandung pengertian bahwa yang dilaporkan adalah hal-hal yang penting dan relevan bagi pengambilan keputusan dan pertanggungjawaban instansi yang diperlukan untuk upaya-upaya tindak lanjutnya, ketiga, Prinsip Manfaat, yang mengandung pengertian bahwa manfaat laporan harus lebih besar daripada biaya penyusunannya dan laporan harus mempunyai manfaat bagi peningkatan pencapaian kinerja.

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas. Pengukuran Kinerja digunakan sebagai dasar untuk penelitian keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang dimaksud, yang ditetapkan dalam Visi dan Misi Kabupaten Luwu Timur. Dalam hal ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur melaksanakan kewajiban dengan menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja sesuai dengan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Pengukuran capaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 digunakan untuk mengetahui keberhasilannya dalam melaksanakan program dan kegiatan selama 1 (satu) tahun anggaran. Indikator kinerja yang digunakan adalah indikator kinerja sasaran, yang dirumuskan dalam Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026. Sebagaimana yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024.

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

a. Pengukuran Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran capaian kinerja Tahun 2024 merupakan pengukuran dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur sesuai dengan Perjanjian Kinerja tahun 2024 yang telah disepakati bersama, dalam hal ini antara Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Luwu Timur dengan Bupati Luwu Timur. Tingkat akuntabilitas kinerja instansi diukur dari setiap komponen yang ada dengan kategori sebagai berikut:

Tabel. 4
Tingkat Akuntabilitas Kinerja

No	Kategori	Nilai Angka	Interpretasi
1.	AA	>90	Sangat memuaskan
2.	Α	>80-90	Memuaskan, memimpin perubahan, berkinerja tinggi, dan sangat akuntabel
3.	ВВ	>70-80	Sangat baik, akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal
4.	В	>60-70	Baik, akuntabilitas kinerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan
5.	CC	>50-60	Cukup (memadai), akuntabilitas kinerjanya cukup memadai, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggung jawaban
6.	С	>30-50	Kurang, sistem dan tatanan kurang dapat diandalkan, memiliki sistem untuk manajemen kinerja tak perlu banyak perbaikan minor dan perbaikan yang mendasar
7.	D	0-30	Sangat kurang, sistem dan tatanan tidak dapat diandalkan untuk penerapan manajemen kinerja, perlu perbaikan yang sangat mendasar

Adapun capaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2024 dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel. 5
Pengukuran Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2024

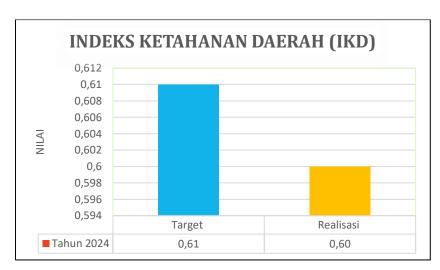
NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024	REALISASI TW II TAHUN 2024	CAPAIAN (%)	NOTIFIKASI
1	2	3	4	5	6	7
1.	Meningkatnya ketahanan daerah menghadapi bencana	Indeks Ketahanan Daerah	0,61	0,60	98,36	•
2.	Meningkatnya layanan SPM sub urusan bencana	Indeks Capaian SPM Sub Urusan bencana (%)	100	37,52	37,52	•
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	83,06	<mark>86,00</mark>	103,5	•

Keterangan: Mencapai/Melampui Target; Belum Mencapai Target

3.2 Analisis Capaian Kinerja

Analisis capaian kinerja dilakukan terhadap capaian sasaran strategis dan sasaran program. Dalam menyimpulkan keberhasilan atau ketidakberhasilan pencapaian tiga sasaran strategis dilakukan dengan mengukur dan menganalisa capaian indikator *outcome*. Analisis capaian sasaran program juga dilakukan sebagai pendukung capaian kinerja sasaran strategis yang dilakukan terhadap indikator kinerja utama. Analisis juga dilakukan terhadap indikator kinerja yang tidak secara langsung mendukung capaian kinerja, namun berpengaruh terhadap perwujudan sasaran program. Analisis efisiensi penggunaan input berupa sumber daya keuangan dan manusia dilakukan terhadap tiap indikator kinerja dengan cara membandingkan capaian indikator kinerja dengan capaian penggunaan sumber daya. Efisiensi sumber daya terjadi manakala capaian indikator kinerja lebih tinggi dari pada capaian penggunaan sumber daya. Analisis efisiensi dilakukan secara terpisah antara sumber daya keuangan dan sumber daya manusia.

Sasaran Strategis I Meningkatnya ketahanan daerah menghadapi bencana



Grafik. 3 Capaian Kinerja Sasaran Strategis I, Triwulan II Tahun 2024

🖶 🛮 INDEKS KETAHANAN DAERAH (IKD)

Perbandingan antara target dan realisasi kinerja Sampai Dengan Triwulan I Tahun 2024

Formulasi indikator yang digunakan untuk menghitung capaian target adalah sebagai berikut : "Nilai Indeks Ketahanan Daerah"

Indikator sasaran BPBD Kabupaten Luwu Timur adalah Indeks Ketahanan Daerah dengan target tahun 2024 adalah 0,61 dan realisasi sebesar 0,60 dengan persentase capaian kinerja 98,36%. Realisasi sampai dengan triwulan II TA. 2024 masih menggunakan baseline tahun 2023 karena untuk penilaian Indeks Ketahanan Daerah Tahun 2024, sesuai timeline penilaian dilaksanakan pada Bulan Nopember 2024 dan dilakukan verifikasi pada Bulan Desember 2024 oleh BNPB.

Realisasi yang diperoleh merupakan hasil pelaksanaan Penilaian Indeks Ketahanan Daerah (IKD) secara mandiri yang dilaksanakan pada Bulan Nopember 2023 melalui tahapan Sosialisasi, FGD Penilaian Indeks Ketahanan Daerah dan Finalisasi yang diikuti oleh OPD terkait. Dalam pelaksanaan FGD didampingi oleh Fasilitator Nasional dan diperoleh hasil 0,60 (sedang). Hasil penilaian tersebut selanjutnya diverifikasi oleh BPBD Provinsi Sulawesi-Selatan, selanjutnya diverifikasi

akhir oleh BNPB pada Bulan Desember 2023. Adapun hasilnya akan dirilis oleh BNPB melalui BUKU IRBI Tahun 2023 yang diterbitkan pada Awal Tahun 2024.

Capaian target tersebut diperoleh dari penginputan Tools 71 Indikator berdasarkan baseline data 2018-2023 yang dimutakhirkan setiap tahun, dan data tersebut bersumber dari OPD terkait seperti Bapelitbangda, Dinas PU & PR, Dinas Kesehatan, Dinas Perkimtan, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Pertanian & Ketahanan Pangan, DLH, Satpol PP, Dinas DAMKAR & Penyelamatan, TNI/POLRI dsb.

Penginputan hasil penilaian IKD dilakukan melalui inaRISK yaitu suatu platform yang digunakan untuk menilai kapasitas daerah secara mandiri. Hasil IKD nantinya tersimpan dalam server dan dapat diakses kembali oleh masing-masing daerah sehingga ini memudahkan proses pengarsipan dan pemutakhiran nilai IKD.

Indeks Ketahanan Daerah adalah instrumen untuk mengukur kapasitas daerah dengan asumsi bahwa bahaya atau ancaman bencana dan kerentanan di daerah tersebut kondisinya tetap. INDEKS KETAHANAN DAERAH (IKD) merupakan bagian dari perhitungan Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI). IKD dinilai setiap tahun untuk mengukur keberhasilan capaian kegiatan penanggulangan bencana. IKD aspek penting: merupakan komponen pada kajian kapasitas di dalam KRB data input dalam perhitungan IRBI. Penilaian IKD dilakukan dengan mekanisme 'pemutakhiran' bukan pengisian dari awal. Hasil penilaian akan diverifikasi oleh Provinsi dan BNPB, sehingga nilai bisa berubah. Nilai IKD yang baik adalah yang selalu meningkat, sehingga baseline yang rendah pun tidak masalah

Salah satu strategi dalam menurunkan Indeks Risiko Bencana adalah peningkatan kapasitas Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam penanggulangan bencana melalui Penilaian Indeks Ketahanan Daerah (IKD) yang merupakan upaya untuk mengukur kapasitas penanggulangan bencana di wilayah administrasi, baik di tingkat kabupaten, kota dan propinsi.

Dalam penilaian Indeks Ketahanan Daerah terdapat 71 indikator yang dipedomani dengan 7 program prioritas yaitu : Penguatan kelembagaan dan kebijakan, Pengkajian risiko dan perencanaan terpadu, Pengembangan sistem informasi diklat dan logistik, Penanganan tematik kawasan rawan bencana, Peningkatan efektifitas pencegahan dan mitigasi bencana, Perkuatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana serta Pengembangan sistem pemulihan bencana.

Adapun hasil dari penilaian indeks kapasitas penanggulangan bencana di Kabupaten Luwu Timur adalah :

- 1. Penguatan kelembagaan dan kebijakan, yaitu :
 - Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2020 tentang Pembentukan dan susunan perangkat daerah
 - Peraturan Bupati Nomor 74 tahun 2021 tentang SOTK BPBD
 - Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2011 tentang RTRW Kab. Luwu Timur 2011-2031
 - Rencana Detail Tata Ruang 2015-2025
 - Rencana Detail Tata Ruang Wotu, Malili, Wasuponda, Towuti, Mangkutana, Tomoni dan Tomoni Timur
 - Perda Nomor 7 tahun 2014 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan Hidup
 - Peraturan Daerah Nomor 15 tahun 2010 tentang bangunan Gedung
 - Peraturan Daerah Nomor 14 tahun 2014 tentang Penanggulangan Bencana
 - Perbup BTT Nomor 38 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran , pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi belanja tidak terduga
 - Perbup Nomor 34 Tahun 2017 tentang perubahan atas peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 3 tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur
 - SK Kepala Dinas Kesehatan Nomor 094/Dinkes/115/XI/2022 tentang Klaster Kesehatan dalam penanggulangan bencana
 - SK Bupati Luwu Timur Nomor 180/VII/Tahun 2018 tentang SOP Pelayanan Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- 2. Pengkajian risiko dan perencanaan terpadu, yaitu :
 - Dokumen Kajian Risiko Bencana Kab. Luwu Timur
 - Peta Bahaya/Peta Risiko Bencana Kab. Luwu Timur
 - Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana Kab. Luwu Timur
- 3. Pengembangan sistem informasi diklat dan logistik, yaitu :
 - PUSDALOPS BPBD
 - Pelatihan Penanggulangan Bencana setiap tahun
 - Gladi Penanggulangan Bencana setiap tahun
 - Pengadaan kebutuhan logistik dan peralatan bencana setiap tahun

- Penyimpanan/Gudang Logistik BPBD
- Pemeliharaan peralatan dan suplay logistik secara periodik
- Kemampuan pemenuhan pangan daerah untuk kebutuhan darurat.
- 4. Penanganan tematik kawasan rawan bencana, yaitu:
 - Penataan Ruang berbasis PRB
 - Pembentukan Desa Tangguh Bencana
 - Rumah Sakit terakreditasi (RS. I Lagaligo dan RS. Primaya Hospitasl Inco Soroako)
 - Puskesmas terakreditasi 17 dari 18 Puskesmas
 - Satuan Pendidikan Aman Bencana Kabupaten Luwu Timur
 - Pembentukan Forum Risiko Bencana Tingkat Kabupaten
 - Forum Pengurangan Risiko Bencana Tingkat Desa
- 5. Peningkatan efektifitas pencegahan dan mitigasi bencana, yaitu :
 - Rehabilitasi tanggul sungai
 - Normalisasi/Restorasi sungai
 - Pembangunan Bendung Sungai
 - Bangunan penahan gelombang (Pembangunan Sea Wall Pantai Lemo Desa Mabonta)
 - Bangunan Perkuatan Tebing Sungai
 - Pembangunan Embung
- 6. Perkuatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana, yaitu:
 - Dokumen Rencana Kontigensi Banjir
 - Dokumen Rencana Kontijensi Gempa Bumi
 - Sistem Peringatan Dini Banjir di Sungai Kalaena (Sirine Banjir dan Sensor TMA Sungai)
 - EWS INA Tews (Sistem Peringatan Dini Gempa Bumi yang Berpotensi Tsunami)
 - Pelaksanaan Simulasi, Sosialisasi, Pelatihan, Gladi kesiapsiagaan
 - Pemasangan Rambu-Rambu dan Papan Himbauan Peringatan Bencana
 - RTD PT. Vale Indonesia mengenai kegagalan Bendungan
 - Penentuan Status Darurat Bencana
 - Penerapan Sistem Komando Operasi Darurat
 - Pengerahan Tim Reaksi Cepat ke lokasi bencana
 - Pengerahan Tim SAR/BASARNAS

- Pengerahan Bantuan Masyarakat dan Dunia Usaha
- Penghentian Status Darurat Bencana
- 7. Pengembangan sistem pemulihan bencana, yaitu :
 - Perbaikan rumah penduduk (pasca bencana)
 - Bantuan Keuangan untuk korban bencana.

Mengacu kepada Indikator Kinerja Utama Kepala Daerah terkait kebencanaan yaitu Indeks Risiko Bencana, maka BPBD beserta stakeholder lainnya mempunyai tugas untuk menurunkan Nilai IRB Kabupaten Luwu Timur melalui peningkatan Kapasitas penanggulangan bencana di Kabupaten Luwu Timur melalui Penilaian Indeks Ketahanan Daerah. Hasil dari penilaian IKD akan berpengaruh terhadap penurunan Nilai IRB IRB Kabupaten Luwu Timur. Nilai IRB Kabupaten Luwu Timur tahun 2023 adalah 152,28 dari target 202, dengan persentase capaian 132,65%.

Nilai IRB Kabupaten Luwu Timur tersebut mengalami penurunan karena adanya upaya dari Pemerintah Kabupaten Luwu Timur khususnya BPBD Kabupaten Luwu Timur untuk melakukan Penilaian Indeks Ketahanan Daerah (IKD), yang dilaksanakan setiap tahunnya. "Jika Indeks Ketahanan Daerah meningkat, maka Indeks Risiko Bencana akan menurun". IKD dan IRBI menjadi RAPOR bagi Pemerintah Daerah di bidang penanggulangan bencana. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Kabupaten Luwu Timur telah berinvestasi dalam Pengurangan Risiko Bencana di Kabupaten Luwu Timur. Pengukuran IRB dan IKD merupakan ukuran keberhasilan capaian kegiatan penanggulangan bencana di Kabupaten/Kota



Grafik. 4Prioritas penilaian Indeks Ketahanan Daerah Kab. Luwu Timur s.d Triwulan II Tahun 2024

NO.	PRIORITAS	INDEKS PRIORITAS	INDEKS KAPASITAS DAERAH	TINGKAT KAPASITAS DAERAH
1	Perkuatan Kebijakan dan Kelembagaan	0,82		
2	Pengkajian Risiko dan Perencanaan Terpadu	0,80		
3	Pengembangan Sistem Informasi, Diklat dan Logistik	0,76		
4	Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana	0,73	0,60	SEDANG
5	Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana	0,60		
6	Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana	0,56		
7	Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana	0,35		

Tabel. 6

Hasil Penilaian Indeks Ketahanan Daerah Kab. Luwu Timur s.d Triwulan II Tahun 2024

2. Perbandingan antara target dan realisasi Triwulan II Tahun 2024 dengan Triwulan sebelumnya

Tabel. 7
Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan I Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya

Sasaran I :	Meningkatnya Ketahanan Daerah menghadapi Bencana						
Indikator Kinerja	Triwijian i Tanun 2024 - Triwijian ii Tanun 2024					2024	2024
Sasaran	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	0,61	0,60	98,36 %	0,61	0,60	98,36 %	0,61 (sedang)

Berdasarkan tabel diatas maka dapat dijelaskan bahwa perbandingan capaian kinerja Triwulan I dengan Triwulan II tahun 2024, nilainya masih sama. Hal ini karena Penilaian Indeks Ketahanan Daerah (IKD) Tahun 2024 baru belum dilaksanakan, sehingga data tersebut diatas masih berdasarkan data yang diperoleh pada tahun 2023 (Baseline Tahun 2023). Sedangkan pada tahun 2024, FGD untuk Penilaian Indeks Ketahanan Daerah (IKD) direncanakan pada Triwulan IV TA. 2024 sesuai dengan Timeline Penilaian IKD.

Penetapan target yang meningkat setiap tahunnya disesuaikan dengan target yang tertuang dalam Renstra BPBD 2021-2026.

3. Perbandingan Capaian Kinerja sampai dengan Tahun ini dengan Target Jangka Menengah

Berdasarkan realisasi sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 jika dibandingkan dengan target yang direncanakan sampai dengan tahun 2026, telah melampaui target yang direncanakan. Dan upaya yang dilakukan adalah melakukan pemutakhiran Nilai IKD melalui FGD Penilaian Indeks Ketahanan Daerah setiap tahunnya, agar 7 prioritas dengan 71 indikator dan 284 Pertanyaan dapat dipenuhi secara bertahap, yang pada akhirnya dapat menurunkan Indeks Risiko Bencana Kabupaten Luwu Timur.

Adapun perbandingan antara target dan capaian pada Triwulan II Tahun 2024 dengan target jangka menengah pada Renstra BPBD Kabupaten Luwu Timur 2021-2026 dapat dilihat pada tabel berikut Ini:

Tabel. 8 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2023 Terhadap Target Jangka Menengah (2021 – 2026)

Sasaran I :	Meningkatnya Ketahanan Daerah menghadapi Bencana		Target Akhir Renstra 2026	% Capaian s/d 2024 terhadap target akhir
Indikator Kinerja Sasaran	Realisasi			
	Triwulan II Tahun 2024	Realisasi sampai dengan Tahun 2024		Renstra 2026
Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	0,60	0,60	0,50 (sedang)	120%

4. Perbandingan Dengan Target Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota

Dalam Penilaian Indeks Ketahanan Daerah (IKD) tidak ditetapkan Standar Nasional tetapi hanya score penilaian yaitu 0,01 s.d 0,39 kategori *Rendah*, 0,40 s.d 0,79 kategori *Sedang* dan 0,8 s.d 1 kategori *Tingi*. Dan sampai dengan Triwulan II TA. 2024, Nilai IKD Kabupaten Luwu Timur masih menggunakan baseline tahun 2023 yaitu 0,60 dengan predikat sedang.

Penilaian Indeks Ketahanan Daerah (IKD) mempunyai Timeline penilaian setiap tahunnya yaitu proses pengumpulan data dan penilaian IKD sampai dengan bulan September, selanjutnya pengumpulan dan Verifikasi IKD bulan Oktober s.d Nopember oleh BPBD Provinsi dan pada bulan Desember dilakukan verifikasi, perhitungan dan publikasi oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Berdasarkan hasil Penilaian Indeks Ketahanan Daerah (IKD) Tahun 2023 (Baseline Tahun 2023) yang dilakukan oleh BNPB diperoleh Nilai IKD Kabupaten Luwu Timur sebesar 0,60 dengan predikat sedang dari target yang direncanakan sebesar 0,45 dengan persentase capaian kinerja 133,33%. Nilai yang diperoleh Kabupaten Luwu Timur lebih tinggi jika dibandingkan dengan Nilai Indeks Ketahanan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 0,42 (sedang) yang merupakan hasil ratarata nilai IKD dari 24 Kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi-Selatan. Dan bila dibandingkan dengan 24 Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan, maka Nilai IKD Kabupaten Luwu Timur berada pada peringkat I. Hal ini bisa tercapai karena Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dalam hal ini BPBD Kab. Luwu Timur telah menetapkan IKD sebagai Indikator Kinerja Utama. Didukung dengan penganggaran untuk pelaksanaan Sosialisasi dan FGD Penilaian Indeks Ketahanan Daerah yang

didampingi oleh Fasilitator Nasional dan Daerah. Pada pelaksanaan FGD tersebut menghadirkan OPD terkait sehingga diperoleh data dan informasi pendukung yang lebih akurat dan lengkap. Adapun perbandingan Nilai IKD Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel.9Nilai Indeks Ketahanan Daerah (IKD) 24 Kab/Kota

KABUPATEN/KOTA	NILAI IKD TAHUN 2023		
Kepulauan Selayar	0,41		
Bulukumba	0,37		
Bantaeng	Tidak menilai		
Jeneponto	Tidak menilai		
Takalar	Tidak menilai		
Gowa	Tidak menilai		
Sinjai	Tidak menilai		
Maros	Tidak menilai		
Pangkajene & Kepulauan	0,34 0,54		
Barru			
Bone	0,43		
Soppeng	0,31		
Wajo	0,55		
Sidenreng Rappang	0,28		
Pinrang	Tidak menilai		
Enrekang	0,45		
Luwu	0,35		
Tana Toraja	Tidak menilai		
Luwu Utara	0,59		
LUWU TIMUR	0,60		
Toraja Utara	0,27		
Kota Makassar	Tidak menilai		
Kota Pare-Pare	0,41		
Kota Palopo	0,56		

5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau Peningkatan/Penurunan kinerja serta alternative Solusi yang telah dilakukan

- Analisis Penyebab keberhasilan dalam pencapaian indikator sasaran tersebut yaitu :
 - Ditetapkannya Mitigasi Bencana sebagai Program Prioritas Kepala Daerah sehingga Indikator Kinerja Utama yaitu Indeks Risiko Bencana dan Indeks Ketahanan Daerah menjadi lebih focus dalam pencapaiannya.

- Tersedianya Data Base (Baseline 2018-2023) berdasarkan hasil penilaian Indeks Ketahanan Daerah Kabupaten Luwu Timur.
- Telah dilakukan pemutakhiran data IKD setiap tahun oleh BPBD Kabupaten Luwu Timur melalui pelaksanaan Forum Group Discussion (FGD) Penilaian Indeks Ketahanan Daerah (IKD) dengan melibatkan OPD terkait, Instansi Vertikal dan Dunia Usaha.
- Terdapat beberapa rekomendasi pada penilaian IKD tahun sebelumnya yang telah ditindaklanjuti seperti penyusunan Dokumen Rencana Kontijensi Gempa Bumi, PUSDALOPS BPBD, Sistem Peringatan Dini Banjir (EWS), RDTR yang telah berbasis Pengurangan Risiko Bencana (PRB) dan beberapa rencana penyusunan dokumen kebencanaan yang telah tertuang dalam dokumen Renstra BPBD 2021-2026, Penyusunan Dokumen KRB, Dokumen RPB dsb.
- Adanya dukungan dari Pemerintah Daerah karena telah menetapkan Mitigasi Bencana sebagai program prioritas kepala daerah dan dukungan penganggaran untuk kegiatan Mitigasi Bencana di seluruh desa di Kabupaten Luwu Timur melalui Dana Bantuan Khusus Keuangan (BKK).

❖ Hambatan/Kendala

Dalam pencapaian indikator Indeks Ketahanan Daerah (IKD), terdapat beberapa hambatan atau kendala yang dihadapi yaitu :

- Keterbatasan anggaran untuk pengurangan risiko bencana (pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan) yang melekat pada OPD strategis dan bukan hanya di BPBD
- Belum optimalnya ketersediaan data dan informasi dari OPD terkait
- Belum meratanya pemahaman terkait IRB dan IKD di beberapa stakeholder
- Telah banyak upaya pengurangan risiko bencana yang telah dilakukan namun belum terpetakan dengan baik
- Belum maksimalnya partisipasi OPD terkait pada pelaksanaan FGD Penilaian IKD.

❖ Solusi

Untuk menjawab permasalahan atau kendala yang dihadapi, maka telah dilakukan beberapa solusi yaitu :

- Mengusulkan penggunaan dana desa untuk kegiatan pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan
- melakukan penjemputan data dan informasi ke OPD terkait
- Melakukan sosialisasi/lokakarya terkait IRB dan IKD
- Melakukan pemetaan terkait upaya pengurangan risiko bencana yang telah dilakukan di Kabupaten Luwu Timur
- Pelaksanaan FGD untuk penilaian IKD sesuai timeline.

Efektivitas Pelaksanaan Program Penanggulangan Bencana dalam menunjang Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran OPD

Pelaksanaan Program Penanggulangan Bencana sudah dikatakan efektif atau berhasil, dengan melihat Penurunan Nilai Indeks Risiko Bencana Kabupaten Luwu Timur setiap tahunnya yang dicapai melalui Peningkatan Kapasitas Daerah dalam penanggulangan bencana melalui Penilaian Indeks Ketahanan Daerah (IKD). Keberhasilan tersebut dicapai melalui peningkatan koordinasi lintas sektor dan lintas OPD. Penyelenggaraan penanggulangan bencana bukan hanya bertumpuh pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah saja tetapi didukung oleh OPD teknis terkait, Akademisi, Dunia Usaha, media dan Masyarakat atau (Pentahelix Kebencanaan).



Grafik 5 Trend Nilai IRB Kabupaten Luwu Timur 2019 s.d 2023



Grafik 6 Trend Nilai IKD Kabupaten Luwu Timur 2018 s.d 2023

6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Efisiensi Anggaran

Dalam pencapaian sasaran strategis BPBD, terdapat beberapa efisiensi angggaran yaitu :

- Terkait kebutuhan logistik penanggulangan bencana, pada tahun 2024, BNPB dan BPBD Provinsi Sul-Sel memfasilitasi logistik korban bencana untuk BPBD Kab. Luwu Timur, daftar bantuan logistik Tahap I yaitu: Makanan Siap Saji 6 paket, Matras 5 lbr, Sabun Mandi 144 Pcs, Jerigen Lipat 30 Pcs, Perlengkapan sekolah 7 Pcs, Logistik Pangan 15 Paket (Gula paser, Minyak Goreng, Ikan Kaleng, Beras, Air Mineral), Logistik Perlengkapan Keluarga 5 Paket (Sabun Mandi, Sikat Gigi, Pasta Gisi, Shampo, Handuk Kecil, Handuk Dewasa, Pembalut, Sarung, Minyak kayu Putih), Logistik Shelter Kit (Tenda Terpal Plastik 3 buah dan selimut 20 buah). Dan bantuan logistic Tahap II, terdiri dari: Makanan Siap Saji 6 Paket, Matras 5 Lbr, Sabun Mandi 72 Pcs, Jerigen Lipat 30 Pcs, Ember 10 Pcs, Masker 2000 Pcs, Logistik Pangan 20 Paket (Gula Pasir, Minyak Goreng, Ikan Kaleng, Air Mineral), Logistik Shelter Kit (selimut 20 buah).
- Sedangkan untuk pemenuhan kebutuhan dasar lainnya untuk korban bencana seperti beras dan bahan makanan pokok lainnya selain dari BPBD, juga disediakan di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan serta Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

 Dalam pencapaian target program prioritas (KP 1) Pemerintah Daerah yaitu MITIGASI BENCANA, terdapat pelaksanaan program/kegiatan di Desa melalui Dana Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Tahun 2024 ataupun menggunakan Dana Desa yang dilaksanakan oleh beberapa desa di wilayah Kabupaten Luwu Timur. Kegiatan yang dilaksanakan yaitu Pengadaan APAR.

Efisiensi Sumber Daya

- Dengan keterbatasan sumber daya sarana, prasarana dan tenaga dalam menyampaikan informasi maupun pengetahuan tentang kebencanaan, maka dapat terfasilitasi dengan adanya papan himbauan atau peringatan dini yang ditempatkan pada beberapa kecamatan sehingga dengan sendirinya masyarakat dapat melihat langsung informasi terkait kebencanaan dari media atau papan himbauan peringatan dini tersebut. Selain itu penyebarluasan informasi juga dilakukan melalui Media Sosial yaitu FB, IG & Twitter yaitu <u>Pusdalops Bpbd Lutim</u>.
- Sumber daya yang ada pada BPBD Kabupaten Luwu Timur baik sumber daya manusia maupun sumber daya peralatan masih belum memadai, namun dengan keterbatasan tersebut, BPBD tetap berupaya untuk bekerja maksimal dalam penanggulangan bencana. Sumber daya manusia yang ada di BPBD Kabupaten Luwu Timur sebanyak 38 orang yang terdiri dari 14 orang PNS, PPPK 1 org, 2 orang Upah Jasa, dan 21 orang Tim Reaksi Cepat (TRC). Dengan membandingkan luas cakupan wilayah pelayanan penanggulangan bencana yang tidak sebanding dengan jumlah personil yang ada. Maka dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, BPBD Kabupaten Luwu Timur memaksimalkan tenaga relawan-relawan dari berbagai komunitas seperti Tim Relawan Penanggulangan Bencana yang berjumlah 182 orang yang tersebar di 11 kecamatan, BASARNAS, Tim SAR, TAGANA, PMI dsb. Sedangkan dari segi sumberdaya sarana dan prasarana dalam hal ini terkait peralatan bencana, BPBD memaksimalkan peralatan yang dimiliki oleh OPD terkait seperti Dinas PU&PR, Dinas Perikanan, Dinas Sosial P3A, Dinas Kesehatan, RSUD, Dinas Perhubungan, BASARNAS dsb.
- Terkait pemulihan sarana dan prasarana fisik serta nonfisik pasca bencana, juga dapat difasilitasi oleh SKPD terkait seperti Dinas PU & PR,

Dinas Perikanan, Dinas Perumahan Kawasan Permukiman & Pertanahan. Jadi dalam hal ini bahwa pemulihan sarana dan prasarana fisik serta nonfisik pasca bencana dapat terwujud melalui kerjasama/koordinasi lintas sektoral baik itu dari BPBD maupun OPD terkait dengan memaksimalkan sumberdaya yang ada. Terkait Dana Hibah Rehabilitasi & Rekonstruksi Pasca Bencana, telah diajukan Proposal ke BNPB dan telah di Verifikasi Oleh BNPB dengan Besaran Anggaran Rp 8.587.571.000,-.

Analisis Efisiensi Sumber Daya

Tabel. 10
Pencapaian Kinerja dan Anggaran Triwulan II Tahun 2024

			Kinerja			Anggaran				
Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Alokasi Anggaran Triwulan II Tahun 2024	Realisasi s.d Triwulan II Tahun 2024	Capaia n (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8			
Meningkatnya ketahanan daerah menghadapi bencana	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	0,61	0,60	98,36%	778.581.810,-	278.629.509,-	35,79%			
Meningkatnya layanan SPM sub urusan bencana	Indeks Capaian SPM Sub Urusan bencana (%)	100%	37,52%	37,52%			33,1373			
	Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100%	65,63%	65,63%	116.395.070,-	0,-	0%			
	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%	13,05%	13,05%	138.765.550,-	36.712.100,-	26,46%			
Program Penanggulan gan Bencana	Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana yang responsif gender	100%	33,87%	33,87%	387.508.870,-	232.084.400,-	59,89%			
	Cakupan sistem dasar penanggulangan bencana sesuai SOP kebencanaan	100%	0%	<mark>0%</mark>	135.912.320,-	9.833.009,-	10,42%			

Sasaran Strategis Indikator Kinerja % Capaian Kinerja % Penyerapan Anggaran % Tingkat Efisiensi Biaya

1 2 3 4 5

Meningkatnya ketahanan daerah menghadapi bencana Daerah (IKD)

98,36% 35,79% 64,21%

Tabel. 11
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pencapaian sasaran strategis Meningkatnya Ketahanan Daerah Menghadapi Bencana sebesar 98,36% dengan persentase penyerapan anggaran sebesar 35,79%, sehingga persentase efisiensi biaya adalah 64,21%. Adapun Persentase efisiensi biaya dapat hitung dengan menggunakan rumus:

7. Analisis Program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja sasaran

Progam Penanggulangan Bencana

Penanggulangan Bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang beresiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi.

Tujuan program penanggulangan bencana yaitu: memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana, menyelaraskan peraturan perundangundangan yang sudah ada, menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh, menghargai budaya lokal, membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta, mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan dan kedermawanan, menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana bukan hanya melekat pada BPBD saja tetapi didukung oleh beberapa OPD terkait seperti Dinas PU&PR, Dinsos P3A, Dinas Pemadam Kebekaran & Penyelamatan, Dinas Kesehatana, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pertanian & Ketahanan Pangan, Dinas Perikanan, BKAD, Bapelitbangda, BKPSDM, Dinas PMD, DPRD, TNI/POLRI, Instansi Vertikal, Dunia Usaha, Media dan Masyarakat. Dan dalam Upaya pencapaian Sasaran

Meningkatnya Ketahanan Daerah menghadapi bencana, sangat dibutuhkan kolaborasi Pentahelik kebencanaan. Dan sebagai OPD pengampuh untuk pencapaian Indikator Kepala Daerah yaitu Penurunan Indeks Risiko Bencana melalui Penilaian Indeks Ketahanan Daerah (IKD), maka BPBD sebagai leading sektor yang melaksanakan Penilaian Indeks Ketahanan Daerah dengan bertugas untuk melihatkan seluruh OPD terkait dalam Forum Group Discussion (FGD) untuk mengetahui seberapa besar kapasitas daerah dalam menghadapi bencana. Sehingga nantinya akan diperoleh data dan informasi pendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Luwu Timur secara menyeluruh. Dan salah satu program yang dilaksanakan oleh BPBD Kab. Luwu Timur dalam pencapaian sasaran yaitu Program Penanggulangan Bencana, dan melalui program tersebut, beberapa indikator dalam penilaian Ketangguhan daerah dapat dipenuhi. Seperti Penyusunan Dokumen Kajian Risiko Bencana, Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana, Dokumen Rencana Kontigenji, Pengintegrasian dokumen KRB kedalam RTRW, Pembentukan Forum Pengurangan Risiko Bencana (PRB) Kabupaten, penyediaan logistik korban bencana, penanganan darurat bencana, pemulihan pasca bencana, diklat kebencanaan, pembentukan Desa Tangguh Bencana, Sekolah Aman Bencana, Sosialisasi Rawan Bencana, Penyusunan Regulasi kebencanaan dsb.

Pada tahun 2024, Pelaksanaan Program Penanggulangan Bencana pada BPBD Kabupaten Luwu Timur dilaksanakan melalui beberapa kegiatan dan sub kegiatan yaitu:

- Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota :
 - Penyusunan Kajian Resiko Bencana Kabupaten/Kota
 - Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana
 Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)
- 2. Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana:
 - Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota
 - Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota
 - Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasaranan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota
 - Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan
 - Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota
 - Penyusunan Rencana Kontijensi

- Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
- 3. Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana:
 - Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota
 - Pencarian,Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota
 - Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota
 - Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana
 - Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit
- 4. Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana:
 - Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota
 - Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota
 - Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota.

8. KESIMPULAN

Capaian Kinerja Sasaran "Meningkatnya Ketahanan Daerah Menghadapi Bencana" dengan Indikator Indeks Ketahanan Daerah (IKD) yaitu 98,36% diperoleh dari rumus perhitungan :

$$= \frac{0,60}{0,61} \times 100$$

- = 98,36%
- Alokasi anggaran yang disediakan pada Dokumen DPA-SKPD BPBD Kabupaten Luwu Timur Triwulan II Tahun Anggaran 2024 dalam pencapaian kinerja sasaran yaitu : Rp. 778.581.810,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 278.629.509,- atau 35,79%.

Sasaran Strategis 2 Meningkatnya Layanan SPM Sub Urusan Bencana



Grafik. 7 Capaian Kinerja Indeks Capaian SPM Sub Urusan Bencana Triwulan II TA. 2024

- ♣ Indeks Capaian SPM Sub Urusan Bencana
- 1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja Triwulan I Tahun 2024

Formulasi indikator yang digunakan untuk menghitung capaian target adalah sebagai berikut: "Pencapaian mutu minimal layanan dasar x Bobot Mutu (20%) + Persentase pencapaian penerima layanan dasar x Bobot Penerima layanan (80%)"

Indeks .Capaian SPM adalah instrumen untuk mengukur tingkat capaian standar pelayanan minimal yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah sesuai kewenangannya. Perhitungan indeks capaian SPM dilakukan melalui penginputan pada aplikasi SPM dengan *link https//spm.bangda.kemendagri.go.id.*

Target Indikator sasaran 2 Triwulan II Tahun 2024 adalah 100% dan realisasi S.D Triwulan II Tahun 2024 adalah 37,52% dengan persentase capaian kinerja 37,52%. Realisasi ini menurun bila dibandingkan dengan realisasi triwulan sebelumnya yaitu 51,59%. Hal ini karena adanya perbaikan target tahunan yang disesuaikan dengan realisasi tahun sebelumnya berdasarkan hasil konsultasi dengan Biro Pemerintahan Provinsi Sulawesi Selatan serta Zoom Meeting tentang Tata cara penginputan SPM Triwulan II Tahun 2024 yang dilaksanakan oleh Kemendagri.

Realisasi yang tidak mencapai target disebabkan karena dua layanan SPM realisasinya tidak maksimal yaitu Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana (13,05%) dan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi korban bencana terealisasinya 33,87%, sedangkan Layanan Informasi Rawan Bencana yang realisasinya 65,63%. Hal ini karena terdapat beberapa sub kegiatan yang belum dilaksanakan sesuai anggaran kas dan rencana aksi.

Layanan informasi rawan bencana dapat diberikan kepada Masyarakat melalui 3 metode yaitu sosialisasi melalui tatap muka dengan masyarakat di daerah rawan bencana, sosialisasi melalui media sosial dan wahana multimedia serta sosialisasi melalui papan informasi publik. Dari ketiga hal tersebut, salah satu metode penyebaran informasi melalui papan informasi publik yang ditempatkan di 3 kecamatan mengalami kerusakan (rusak berat) yang berada di Kecamatan Wotu, Nuha dan Towuti. Dan sesuai dengan rencana aksi, Pembangunan papan informasi publi tersebut akan dilaksanakan pada triwulan II TA. 2024, namun belum terlaksana begitu juga dengan pelaksanaan Sosialisasi KIE Rawan Bencana. Hal inilah yang menyebabkan sehingga capaian penyebaran informasi menjadi tidak maksimal atau tidak sesuai dengan target yang direncanakan. Demikian halnya dengan Layanan Pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana. Sedangkan untuk Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana, realisasinya disesuaikan dengan jumlah korban bencana yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi. Dan kita ketahui bahwa kejadian bencana tidak dapat diprediksi kapan, Dimana dan berapa banyak jumlah korban dan kerugian yang terdampak.

2. Perbandingan antara target dan realisasi Triwulan II TA. 2024 dengan tahun Triwulan Sebelumnya

Tabel. 12
Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan II Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya

Sasaran II :		Meningkatnya layanan SPM sub urusan bencana						
Indikator Kinerja	Triwulan I Tahun 2024			Triv	Tahun 2026			
Sasaran	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian		
Indeks Capaian SPM Sub Urusan bencana (%)	100%	51,59%	51,59%	100%	37,52%	37,52%	100%	

Berdasarkan tabel diatas, realisasi Triwulan II Tahun 2024 lebih rendah dibandingkan dengan realisasi triwulan sebelumnya. Hal ini disebabkan karena adanya perbaikan dalam hal penetapan target tahunan yang disesuaikan dengan hasil Zoom Meeting tentang Tata Cara Penginputan SPM Triwulan II Tahun 2024 oleh Kemendagri dan hasil koordinasi dan konsultasi dengan Biro Pemerintahan Provinsi Sulawesi Selatan. Capaian ke-3 jenis layanan tersebut belum maksimal karena beberapa sub kegiatan yang belum dilaksanakan sesuai dengan rencan aksi/anggaran kas. Capaian Layanan Informasi Rawan Bencana belum maksimal karena terdapat papan informasi publik yang berisi tentang informasi kebencanaan yang ditempatkan di beberapa kecamatan mengalami kerusakan. Sedangkan penyebaran informasi melalui tatap muka langsung (sosialisasi rawan bencana) baru akan dilaksanakan pada triwulan II TA. 2024 dan masih tertunda pelaksanaannya. Namun demikian untuk penyebaran informasi kebencanaan melalui media sosial (FB, Instagram, Website) tetap dilakukan guna memaksimalkan penyebaran informasi tentang kepada Masyarakat. Demikian halnya dengan Layanan Pencegahan & Kesiapsiagaan terhadap Bencana. Sedangkan untuk Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana realisasinya disesuaikan dengan kejadian bencana yang terjadi.

3. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Jangka Menengah

Tabel. 13
Perbandingan Capaian Kinerja s.d Triwulan II Tahun 2024 Terhadap Target Jangka Menengah
(2021 – 2026)

Sasaran 2 :	Meningkatny SPM sub urus			% Capaian s/d 2024 terhadap target akhir Renstra 2026	
	Realis	sasi	Target Akhir		
Indikator Kinerja Sasaran	Triwulan II Tahun 2024	realisasi rata- rata sampai dengan Triwulan II tahun 2024	Renstra 2026		
Indeks Capaian SPM Sub Urusan bencana (%)	37,52	37,52	100	77,69%	

Berdasarkan realisasi rata-rata tahun 2021 s.d triwulan II Tahun 2024 jika dibandingkan dengan target yang direncanakan sampai dengan tahun 2026, sangat memungkinkan untuk dapat dicapai. Dan upaya yang dilakukan untuk mencapai target

3 layanan dasar sub urusan bencana yaitu untuk layanan informasi rawan bencana dengan cara memaksimalkan penyebaran informasi melalui media sosial dan papan himbauan peringatan dini bencana di setiap kecamatan serta sosialisasi secara tatap muka langsung melalui pelaksanaan Sosialisasi KIE Rawan Bencana di 11 kecamatan. Sedangkan untuk layanan pencegahan dan kesiapsiagaan dengan cara memaksimalkan pelaksanaan kegiatan serta anggaran yang terdapat pada beberapa OPD terkait misalnya Pelaksanaan kegiatan kebencanaan melalui Dana Bantuan Khusus Keuangan untuk Mitigasi Bencana pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, dunia usaha dan Masyarakat. Memaksimalkan penggunaan sarana prasarana BMKG untuk deteksi Gempa Bumi Lokal dan yang bersumber dari luar wilayah Luwu Timur. Begitu juga untuk layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana. Dengan memaksimalkan koordinasi dengan BASARNAS, pengerahan Tim Relawan, dunia usaha dan masyarakat dalam melakukan penyelamatan dan evakuasi korban bencana.

4. Perbandingan dengan Target Nasional (SPM Penanggulangan Bencana)

Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal.

Berdasarkan Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota dan Permendagri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota, maka terdapat 3 jenis pelayanan dasar pada sub urusan bencana yang wajib dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah yaitu

- 1. Pelayanan informasi rawan bencana
- 2. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana
- 3. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana

Adapun *Target nasional* dari ketiga jenis pelayanan dasar tersebut adalah *100%* setiap tahun. Olehnya itu perbandingan antara target nasional dengan capaian Kabupaten/Kota dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel. 14

Realisasi Target SPM Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

		Urai	an Kinerja		Angg	jaran	
No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Capaian	Target Nasional (%)	Realisasi Triwulan II Tahun 2024 (%)	Anggaran Triwulan II Tahun 2024 (Rp)	Realisasi Triwulan II Tahun 2024 (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Pelayanan Informasi Rawan bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100%	65,63%	116.395.070,-	0,-	0%
2	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiaga an Terhadap Bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%	13,05%	138.765.550,-	36.712.100,-	26,46%
3	Pelayanan Penyelamat an dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	33,87%	387.508.870,-	232.084.400,-	59,89%

Tabel. 15
Alokasi Anggaran Bidang Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan
Masyarakat Tahun 2024

				Alokasi Biaya	
				Anggaran	
No	Jenis Pelayanan Dasar	Program/ Kegiatan / sub Kegiatan	APBN	APBD	Sumber dana lain yang sah
1	2	3		5	6
		Program Penanggulangan Bencana	-	1.126.855.570,-	-
1	Pelayanan Informasi Rawan bencana	Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	-	116.395.070,-	-
		Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota	-	116.395.070,-	-
2	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	-	257.723.360,-	-

		Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	-	61.020.750,-	-
		Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	-	65.750.000,-	-
		Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	-	57.937.800,-	-
		Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	-	35.877.450,-	-
		Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	-	37.138.100,-	-
	Pelayanan				
3	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Kegiatan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	-	752.737.140,-	-
3	Penyelamatan dan Evakuasi Korban		-	752.737.140,- 625.230.900,-	-
3	Penyelamatan dan Evakuasi Korban	Evakuasi Korban Bencana Respon Cepat Darurat Bencana	-	·	- - -
3	Penyelamatan dan Evakuasi Korban	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/ Kota Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana		625.230.900,-	- - -
3	Penyelamatan dan Evakuasi Korban	Evakuasi Korban Bencana Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/ Kota Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi		625.230.900,-	- - -

Tabel. 16 Kendala, Permasalahan dan Solusi SPM Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR CAPAIAN	KENDALA/PERMASALAHAN	SOLUSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	(1). Keterbatasan Anggaran/pembiayaan penanggulangan bencana, (2). Terdapat Papan Himbauan Informasi Bencana di 3 Kecamatan dalam kondisi rusak berat.	(1).Memaksimalkan penyebarluasan informasi rawan bencana melalui Pusdalops Penanggulangan Bencana, Papan Himbauan Peringatan Dini dan Media Sosial, (2).Memaksimalkan keterlibatan Dunia Usaha dan Masyarakat dalam penyebarluasan informasi rawan bencana, (3).Meningkatkan koordinasi dilingkup Pemerintah daerah, Dunia Usaha dan masyarakat terkait kegiatan kebencanaan.

2	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	(1). Keterbatasan Anggaran/pembiayaan penanggulangan bencana	(1).Meningkatkan koordinasi dilingkup Pemerintah daerah, Dunia Usaha dan masyarakat terkait kegiatan kebencanaan, (2).Memaksimalkan program dan kegiatan pada OPD terkait yang menyediakan anggaran untuk Mitigasi Bencana struktural dan Non Struktural
3	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	(1).Keterbatasan sarana dan prasarana penanggulangan bencana, (2).Luasnya cakupan wilayah penanganan penanggulangan bencana yang tidak sebanding dengan jumlah personil yang ada, (3).Keterbatasan kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia yang memahami mekanisme penanggulangan bencana baik secara teknis maupun non teknis	(1).Pengadaaan sarana dan prasarana penanggulangan melalui BNPB dan BMKG, (2).Penguatan Tim Relawan Penanggulangan Bencana di Kecamatan, (3).Pembentukan Posko Terpadu Penanggulangan Bencana, (4). Keikutsertaan dalam kegiatan Diklat Kebencanaan baik yang dilaksanakan oleh BNPB, BASARNAS, BPBD Provinsi dan BPBD Kab. Luwu Timur

5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau Peningkatan/Penurunan kinerja serta alternative Solusi yang telah dilakukan

- Analisis Penyebab kegagalan dalam pencapaian indikator sasaran yaitu <100% yaitu :</p>
 - Pemahaman terkait pentingnya informasi kebencanaan belum merata di masyarakat
 - Terbatasnya sarana dan prasarana penyebarluasan informasi kebencanaan
 - Kurangnya minat masyarakat dalam mengikuti kegiatan kebencanaan
 - Belum maksimalnya pemahaman terkait konsep pelayanan dasar

❖ Hambatan/Kendala

Dalam pencapaian sasaran tersebut, terdapat beberapa hambatan atau kendala yang dihadapi yaitu :

- Kurangnya sosialisasi
- Minimnya kualitas SDM penanggulangan bencana
- Keterbatasan anggaran
- Terdapat beberapa media penyampaian informasi peringatan dini bencana yang mengalami kerusakan

❖ Solusi

Untuk menjawab permasalahan atau kendala yang dihadapi maka langkahlangkah yang ditempuh adalah :

- Memaksimalkan sosialisasi KIE rawan bencana melalui media sosial (FB, IG, WA) dan melalui papan informasi publik
- Memaksimalkan koordinasi lintas OPD terkait pelaksanaan program/kegiatan yang berkontribusi dalam pencapaian SPM di kabupaten misalnya dengan Dinas PMD terkait penggunaan Dana Bantuan Khusus Keuangan (BKK) untuk Mitigasi Bencana di desa, Dinas Sosial &P3A terkait penyediaan logistik untuk korban bencana, Dinas PUPR terkait pelaksanaan pekerjaan konstruksi untuk Mitigasi Bencana Struktural, Dinas Pertanian & Ketahanan Pangan terkait Cadangan pangan dsb.
- Pencapaian target semaksimal mungkin dengan mencermati capaian program/kegiatan lintas OPD yang berkontribusi dalam pencapaian SPM urusan bencana.
- Peningkatan kapasitas SDM penanggulangan bencana melalui diklat/pelatihan dan simulasi

6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Efisiensi Anggaran

Dalam pencapaian sasaran strategis 2, dilakukan beberapa efisiensi angggaran yaitu :

- Adanya penggunaan Dana Bantuan Khusus Keuangan (BKK) Desa untuk pelaksanaan Mitigasi Bencana di desa.
- Efisiensi anggaran logistik untuk korban bencana karena adanya supporting logistik dari BNPB dan BPBD Provinsi Sul-Sel dan OPD terkait seperti bantuan logistik dari Dinas Sosial & P3A, Cadangan Pangan dari Dinas Pertanian & Ketahanan Pangan serta bantuan logistic dari dunia usaha dan Masyarakat.

Efisiensi Sumber Daya

Dalam pencapaian sasaran 2, dilakukan melalui pemanfaatan sumber daya yaitu:

- Pemanfaatan media sosial dalam penyebaran informasi kebencanaan.
- Pemanfaatan sarana dan prasarana BMKG dalam penyebarluasan informasi kebencanaan seperti alat deteksi gempa bumi lokal yang berada di 3 titik yaitu di Desa Matompi Kec. Towuti, Desa Ussu Kec. Malili, Desa Kalpataru Kec. Tomoni dan Alat Ina TEWS untuk mendeteksi gempa yang berasal dari luar Kabupaten Luwu Timur yang ditempatkan di Kantor BPBD.

7. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Kegagalan Pencapaian Kinerja Sasaran

* Progam Penanggulangan Bencana

Penanggulangan Bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang beresiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi

Sasaran program adalah : (1) Meningkatnya upaya penyebaran informasi tentang bagian wilayah kabupaten/kota rawan bencana, kepada Warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana dan yang berpotensi terpapar bencana, (2) Meningkatnya upaya pencegahan dan mitigasi untuk mengurangi potensi korban jiwa, kerugian ekonomi dan kerusakan lingkungan akibat bencana di daerah rawan bencana, (3) Terselenggaranya penanganan penyelamatan dan evakuasi korban bencana serta pemenuhan kebutuhan dasar bagi korban bencana



Capaian Kinerja Program Penanggulangan Bencana (outcome)

Grafik. 8 Capaian Kinerja Program Penanggulangan Bencana Triwulan II Tahun 2024

- ❖ Indikator Program Penanggulangan Bencana Tahun 2024 adalah :
 - a. Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana (Indikator SPM Sub Urusan Bencana)

Formulasi: "Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana dibagi jumlah seluruh warga negara yang berada di daerah rawan bencana dikali seratus".

$$= \frac{206.879}{308.530} \times 100$$

= 67,05%

Target Triwulan II Tahun 2024 adalah 100% dan realisasi 67,05% dengan persentase capaian kinerja 67,05%. Capaian tersebut berasal dari pelaksanaan Layanan Informasi kebencanaan melalui PUSDALOPS BPBD, Penyampaian informasi kebencanaan melalui Papan himbauan informasi bencana dan rambu-rambu peringatan dini dan rambu-rambu peringatan bencana yang ditempatkan di 8 kecamatan, dengan akumulasi jumlah masyarakat yang menerima layanan informasi sebesar 206.879 org dibagi jumlah penduduk Kab. Luwu Timur 308.530 jiwa. Realisasi yang tidak sesuai dengan target karena terdapat 3 kecamatan yang belum tersedia papan himbauan informasi bencana karena kondisinya rusak berat, dan telah dianggarkan pada Triwulan II Tahun Anggaran 2024 namun belum terlaksana dan masih dalam proses pengadaan.

Dokumentasi Layanan Informasi Rawan Bencana



Papan Himbauan Peringatan Dini Bencana



Papan Himbauan Peringatan Dini Bencana





Media Sosial BPBD

Rambu-Rambu Peringatan Daerah Rawan

b. Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana (Indikator SPM Sub Urusan Bencana) Formulasi: "Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana dibagi jumlah seluruh warga negara yang berada di daerah rawan bencana dikali seratus".

$$= \frac{250}{308.530} \times 100$$

= 0,08%

Target Triwulan II Tahun 2024 adalah 100% dan realisasi 0,08% dengan persentase capaian kinerja 0,08%. Berdasarkan anggaran direncanakan Pelaksanaan Gladi Kesiapsiagaan terhadap Bencana pada Bulan Maret Tahun 2024, namun pelaksanaannya tertunda karena menyesuaikan jadwal dari Tim Penggerak PKK Kab. Luwu Timur. Dan kegiatan tersebut baru terlaksana pada triwulan II TA. 2024 dengan jumlah peserta sebanyak 250 org. Sub kegiatan tersebut merupakan Kerjasama antara BPBD Kab. Luwu Timur dengan Tim Penggerak PKK Kab. Luwu Timur dalam mewujudkan Program Keluarga Tangguh Bencana. Sub kegiatan lainnya yang direncanakan pada triwulan II namun belum terlaksana adalah Pengembangan Kapasitas TRC, dan masih dalam persiapan. Sedangkan untuk pelaksanaan Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota, Pembentukan Desa Tangguh Bencana akan dilaksanakan pada Triwulan III & IV TA. 2024. Layanan Pencegahan dan kesiapsiagaan juga dapat dicapai dengan adanya Penempatan alat deteksi gempa lokal sesar matano di 3 lokasi yaitu Desa Matompi Kec. Towuti, Desa Atue Kec. Malili dan Desa Kalpataru Kec. Tomoni, Penempatan alat deteksi banjir di Kec. Kalaena dan Kec. Malili serta Alat deteksi gempa bumi yang berpotensi tsunami yang ditempatkan di Kantor BPBD Kab. Luwu Timur. Dan semua peralatan tersebut dapat memantau seluruh wilayah kabupaten Luwu Timur. dan dapat diasumsikan bahwa seluruh warga negara yang ada di Kab. Luwu Timur yang berjumlah 308.530 jiwa memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan, sehingga capaian kinerjanya dapat diasumsikan 100%. Namun jika berdasarkan pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan, capaiannya sebesar 0,08%. Dan hal inilah yang perlu menjadi bahan diskusi, koordinasi dan konsultasi dengan pihak yang terkait dengan penginputan Aplikasi SPM.

Dokumentasi Layanan Pencegahan & Kesiapsiagaan Bencana



Alat Pemantau Gempa Bumi Lokal



Alat Deteksi Gempa Bumi Berpotensi Tsunami (INA Tews)



Sistem Peringatan Dini Banjir Sungai Malili



Sistem Peringatan Dini Banjir Sungai Kalaena



Pembukaan Simulasi PB oleh SEKDA Kab. Lutim



Pelaksanaan Simulasi oleh Tim Penggerak PKK



Pertolongan Darurat oleh TRC-BPBD



Pendirian Pos Kesehatan





Pembentukan POSKO Tanggap Darurat Bencana

Pendirian Tenda Pengungsi

 d. Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana yang responsif gender (Indikator SPM Sub Urusan Bencana)

Formulasi: "Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi bencana dibagi jumlah seluruh keseluruhan korban bencana dikali seratus".

= 27,75%

Target Triwulan II tahun 2024 adalah 100% dan realisasi 27,75% dengan persentase capaian kinerja 27,75%. Dengan perhitungan bahwa jumlah korban bencana bulan Januari s.d Juni 2024 sebanyak 356 jiwa (198 lakilaki dan 158 perempuan) dan semuanya memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi. Jumlah tersebut merupakan akumulasi total korban bencana dari 138 kejadian bencana yang terjadi di Kab. Luwu Timur.

Dokumentasi Layanan Penyelamatan & Evakuasi Korban Bencana



Kunjungan Bupati ke lokasi pencarian orang tenggelam



Pencarian orang tenggelam di Sungai Kalaena





Respon Cepat Pembersihan Sungai Akibat Banjir oleh TRC, DAMKAR & BASARNAS





Penyelamatan & Evakuasi Korban Banjir Desa Pongkeru Kec. Malili





Briefing Penyelamatan & Evakuasi Korban Orang Tenggelam di Danau Desa Bantilang Kec. Towuti



Evakuasi Korban Tenggelam







Penyaluran Bantuan Logistik Banjir Bandang di Kab. Luwu Oleh Wakil Bupati Luwu Timur



Penyaluran Bantuan Logisti oleh Kepala BPBD



Respon Cepat Pohon Tumbang oleh TRC





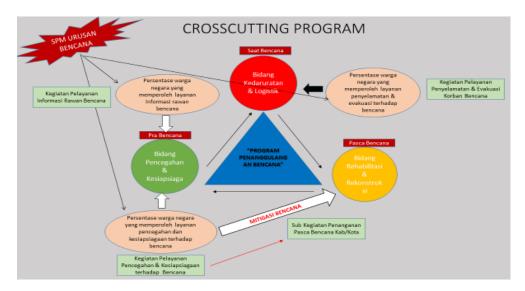
Penyaluran Bantuan Logistik Korban Kebakaran Rumah di Desa Kasintuwu Kec. Mangkutana





Penyaluran Bantuan Logistik Korban Banjir Desa Burau Pantai Kec. Burau

Crosscutting Program Penanggulangan Bencana dalam Pencapaian SPM Sub Urusan bencana :



Pada tahun 2024, pencapaian SPM Sub Urusan Bencana pada Program Penanggulangan Bencana dilaksanakan melalui beberapa kegiatan dan sub kegiatan yaitu:

- 1. Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota
 - Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota
- 2. Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana
 - Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota
 - Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasaranan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota
 - Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan
 - Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota
 - Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
- Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi terhadap Korban bencana
 - Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota
 - Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota
 - Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota
 - Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana
 - Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit

Adapun capaian kinerja Kegiatan/Sub kegiatan pada Triwulan I Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

1. Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota

No.	Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan/Sub Kegiatan	Target 2024	Target TW II TA. 2024	Realisasi TW II TA. 2024	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Terlaksananya pelayanan informasi rawan bencana kepada warganegara yang berada dikawasan rawan bencana dan yang berpotensi terpapar bencana	Cakupan warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	0,08%	0	0	0%
b.	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/kota (Per Jenis Bencana)	Terselenggaranya sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi rawan bencana kepada masyarakat per jenis ancaman bencana	Jumlah peserta sosialisasi kebencanaan	250 org	0 org	0 org	100%

Tabel. 17 Capaian Kinerja Kegiatan/Sub Kegiatan

2. Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana

Tabel. 18 Capaian Kinerja Kegiatan/Sub Kegiatan

No	Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Tahun 2024	Target TW II TA. 2024	Realisasi TW II TA. 2024	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	6	7
1.	Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Meningkatnya upaya pencegahan dan mitigasi untuk mengurangi potensi korban jiwa, kerugian ekonomi dan kerusakan lingkungan akibat bencana di daerah rawan bencana	Cakupan warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	4,36%	0,08%	0,08%	0%
а	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Terlatihnya aparatur dan Warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana	Jumlah aparatur dan warga negara yang ikut pelatihan	100 org	0 org	0 org	0%

b.	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Tersedianya sarana dan prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah sarana prasarana penanggulang an bencana yang diadakan	77 unit	0 unit	0 unit	0%
C.	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Meningkatnya kapasitas kelembagaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya dalam rangka pengurangan resiko bencana	Jumlah desa tangguh bencana yang di bentuk	4 Desa	0 Desa	0 Desa	0%
d.	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Kabupaten/Kota	Terlatihnya Tim Reaksi Cepat (TRC) dalam penanganan bencana	Jumlah Tim Reaksi Cepat yang di diklat	50 org	0 org	0 org	0%
e.	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Terlatihnya warga negara dalam rangka kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah warga negara yang ikut pelatihan	250 org	250 org	0 org	0%

3. Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana

Tabel. 19 Capaian Kinerja Kegiatan/Sub Kegiatan

No	Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Tahun 2024	Target TW II TA. 2024	Realisasi TW II TA.2024	Capaian (%)
1.	Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Terlaksananya pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana sesegera mungkin	Cakupan warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana yang responsif gender	100%	100%	100%	100%
a.	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/ Kota	Terrespon secara cepat setiap hasil penetapan status darurat bencana kurang dari 24 jam	Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana	100%	100%	100%	100%
b.	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Ko ta	Terlaksananya pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana	Persentase jumlah korban laki-laki dan perempuan berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi terhadap kejadian bencana	100%	100%	100%	100%

c.	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Ko ta	Terpenuhinya kebutuhan dasar bagi korban bencana	Persentase jumlah korban bencana laki-laki dan perempuan yang terfasilitasi kebutuhan dasarnya yang responsif gender	100%	100%	100%	100%
d.	Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/ Wabah Penyakit	Terrespon secara cepat setiap hasil penetapan status KLB kurang dari 24 jam	Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status kejadian luar biasa wabah penyakit	100%	100%	100%	100%
e.	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Terlaksananya koordinasi sistem komando oleh pusdalops penanggulangan bencana dalam penyiapan petugas penanganan darurat bencana	Persentase jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana	100%	100%	100%	100%

8. KESIMPULAN

Capaian Kinerja Sasaran "Meningkatnya layanan SPM sub urusan bencana yaitu
 37,52% diperoleh dari rumus perhitungan :

$$= \frac{37,52}{100} \times 100$$

- = 37,52%
- Alokasi anggaran yang disediakan pada Dokumen DPA-SKPD BPBD Kabupaten Luwu Timur Triwulan II Tahun Anggaran 2024 dalam pencapaian kinerja sasaran yaitu : Rp. 642.669.490,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 268.796.500,- atau 41,82%.

Sasaran 3 (Sasaran Pendukung) Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah



Grafik. 9 Capaian Kinerja Sasaran 3 Triwulan II Tahun 2024

NILAI SAKIP

1. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan II Tahun 2024

Tabel. 20 Capaian Indikator Kinerja Sasaran

Sasaran III :	Meningkatnya Aku	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah				
	Tahun 2024			Notifikasi		
Indikator Kinerja Sasaran	Target	Realisasi	Capaian			
NILAI SAKIP	83,06	86,00	103,5	•		
Keterangan: Mencapai/Melar	npui Target ; 🛮 🛑 Beli	um Mencapai Ta	rget			

Formulasi Indikator yang digunakan untuk menghitung capaian target adalah "NILAI SAKIP Hasil LHE Inspektorat".

Target Indikator sasaran Tahun 2024 adalah Nilai SAKIP 83,06(A), namun realisasinya belum dapat dirilis karena belum dilakukan evaluasi sehingga hanya dapat dibandingkan dengan realisasi Nilai SAKIP Tahun 2023. Nilai SAKIP berdasarkan LHE Inspektorat Tahun 2023 yaitu 86,00(A), realisasi tersebut telah

melebihi target Triwukan II Tahun 2024 bahkan melebihi dari target yang direncanakan diakhir periode Renstra yaitu sebesar 80(A). Hal ini dapat tercapai karena telah dilakukan beberapa perbaikan dokumen pendukung SAKIP sesuai dengan hasil coaching clinic Penguatan SAKIP oleh Kementerian PAN-RB, disamping itu beberapa rekomendasi LHE Inspketorat tahun sebelumnya telah ditindaklanjuti begitu juga dengan rekomendasi LHE Kementerian PAN-RB. Diantaranya yaitu dengan melakukan reviu atau perbaikan dokumen perencanaan.

2. Perbandingan antara target dan realisasi Triwulan II Tahun 2024 dengan tahun sebelumnya

Tabel. 21Perbandingan Target dan Realisasi dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

Sasaran III :		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah							Target Tahun	
Indikator		Tahun 2022	2		Tahun 202	23	Triw	ulan II Tahu	ın 2024	2026
Kinerja Sasaran	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Targ et	Realisasi	Capaian	2020
NILAI SAKIP	75	83,05	110,73 %	83,05	86,00	103,55 %	83,06	86,00	103,5	80

Berdasarkan tabel diatas, maka dapat dijelaskan bahwa Nilai SAKIP Triwulan II Tahun 2024 belum dapat dirilis karena masih menunggu untuk proses evaluasi oleh Inspektorat. Untuk Triwulan II Tahun 2024 hanya dapat dibandingkan dengan Nilai SAKIP Tahun 2023. Namun telah dapat dilihat perbandingan capaian kinerja dengan tahun-tahun sebelumnya, Dimana target setiap tahunnya dapat tercapai dengan nilai yang meningkat dan melebihi dari target yang direncanakan. Dalam pencapaian target ataupun untuk mempertahankan Nilai SAKIP yang diperoleh, beberapa hal yang harus dipenuhi yaitu:

- a. Melakukan Reviu kembali Dokumen Perencanaan (Renstra)
- Penetapan target kinerja mengacu kepada capaian dan realisasi tahun sebelumnya
- c. Melengkapi IKU dengan defenisi operasional
- Meningkatkan kualitas LKJ dengan memperdalam analisis capaian dan disertai data dan bukti dukung yang relevan
- e. Melakukan evaluasi/monitoring terhadap pencapaian target Rencana Aksi Kinerja dan Perjanjian Kinerja
- f. Melakukan pengukuran kinerja secara berjenjang

- g. Membuat mekanisme pengumpulan data kinerja
- h. Melakukan pemantauan mengenai kemajuan pencapaian kinerja beserta hambatannya
- i. Melakukan evaluasi program dan kegiatan
- j. Mempublikasikan dokumen Renstra, PK, IKU dan LAKIP pada website Instansi Pemerintah
- k. Menindaklanjuti rekomendasi LHE Kementerian PAN-RB dan LHE Inspektorat.

3. Perbandingan Capaian Kinerja sampai dengan Tahun ini dengan Target Jangka Menengah

Tabel. 22 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 Terhadap Target Jangka Menengah (2021 - 2026)

Sasaran III :	Meningkatnya Kinerja Peran			% Capaian s/d
	Realisasi		Target Akhir Renstra 2026	2023 terhadap target akhir
Indikator Kinerja Sasaran	Triwulan II Tahun 2024	realisasi sampai dengan tahun Tahun 2024	10110110 2020	Renstra 2026
Nilai SAKIP	86,00	86,00	80	107,5%

Berdasarkan tabel tersebut terlihat bahwa perbandingan capaian kinerja sampai sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 yaitu 86,00(A) telah melebihi dari target jangka menengah. Hal tersebut dapat dicapai karena adanya dukungan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan Coaching Clinic untuk penguatan SAKIP OPD dan Pemda. Dampaknya yaitu adanya perbaikan dokumen pendukung SAKIP dan beberapa Rekomendasi hasil LHE Kementerian PAN-RB dan LHE Inspektorat telah ditindaklanjuti oleh OPD. Diantaranya yaitu Reviu Dokumen Renstra, Perbaikan Perjanjian Kinerja dengan melengkapi dengan defenisi operasional, perbaikan dokumen LKJ sesuai sistematika Permenpan 53 Tahun 2014, perbaikan Dokumen IKU dilengkapi dengan defenisi operasional dan formulasi dsb.

4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau Peningkatan/Penurunan kinerja serta alternative Solusi yang telah dilakukan

- Analisis Penyebab keberhasilan dalam pencapaian indikator sasaran yaitu :
 - Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja dan keuangan secara periodik
 - Pelaksanaan tindak lanjut atas setiap rekomendasi LHE Inspektorat dan LHE Kementerian PAN-RB
 - Mereviu Kembali dokumen perencanaan PD
 - Penetapan target kinerja yang tepat

Hambatan/Kendala

Dalam pencapaian sasaran tersebut, terdapat beberapa hambatan atau kendala yang dihadapi yaitu :

- Data pendukung dari bidang teknis belum maksimal
- Belum adanya regulasi dalam penetapan punishment and reward sehingga hasil pengukuran kinerja tidak dapat dijadikan sebagai dasar pengurangan/penambahan penghasilan
- Belum adanya aplikasi yang digunakan dalam pengumpulan data dan pengukuran capaian kinerja

❖ Solusi

Untuk menjawab permasalahan atau kendala yang dihadapi maka langkahlangkah yang ditempuh adalah :

- Memaksimalkan pengolahan data dan informasi dari bidang terkait
- Untuk dibahas lebih lanjut dilevel pimpinan terkait regulasi penetapan punishment dan reward untuk dijadikan sebagai payung hukum

5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Efisiensi Anggaran

Dalam pencapaian sasaran pendukung BPBD, dilakukan beberapa efisiensi angggaran yaitu:

a. Efisiensi anggaran pada belanja pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya dengan memaksimalkan peralatan yang ada dengan melakukan perbaikan sehingga layak untuk digunakan Kembali. b. Terdapat harga satuan untuk belanja pemeliharaan peralatan dan mesin yang bisa digunakan untuk membiayai lebih dari 1 unit peralatan kantor.

Efisiensi Sumber Daya

- a. Keterbatasan jumlah ASN pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi dimaksimalkan dengan rangkap jabatan sebagai pelaksana harian dan memaksimalkan tenaga upah jasa TRC dalam membantu pelaksanaan tugas ASN.
- b. Memaksimalkan peralatan yang ada dengan melakukan pemeliharaan peralatan kantor untuk mendukung pelaksanaan tugas ASN.

Analisis Efisiensi Sumber Daya

Tabel. 23 Pencapaian Kinerja dan Anggaran

			Kinerja			Anggaran	
Sasaran III :	Indikator Kinerja	Target Realisasi Triwulan Capaian (%) 2024 Realisasi Capaian (%)		· ·	Alokasi Anggaran Triwulan II TA. 2024	Realisasi Triwulan II TA. 2024	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat	NILAI SAKIP	83,06	86,00	103,5	3.363.661.216,-	2.102.529.990,-	62,51%

Catatan: Realisasi Triwulan II TA.2024 (Baseline Nilai SAKIP Tahun 2023)

Tabel. 24 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sasaran III	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	% Tingkat Efisiensi Biaya
1	2	3	4	5
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	NILAI SAKIP	103,5	62,51%	37,49%

Pencapaian sasaran pendukung sebesar 103,5% dengan persentase penyerapan anggaran sebesar 62,51%, sehingga persentase efisiensi biaya adalah 37,49%. Adapun Persentase efisiensi biaya dapat hitung dengan menggunakan rumus:

- 6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja
- ❖ Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota Indikator Program adalah Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar dengan formulasi : jumlah capaian kinerja seluruh kegiatan dibagi jumlah seluruh kegiatan. Target 100% dan realisasi 89,37% dengan capaian kinerja 89,37%, dan menyerap anggaran sebesar 62,51%. Capain kinerja program tidak mencapai target karena terdapat beberapa kegiatan dan sub kegiatan yang capaianya kinerjanya <100%, sehingga berpengaruh terhadap kinerja program secara keseluruhan. Seperti pada Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan, hal ini karena adanya beberapa jabatan fungsional yang belum terisi ASN. Demikian halnya dengan sub kegiatan pemeliharaan kendaraan dinas dan peralatan kantor yang realisasinya disesuaikan dengan kondisi kendaraan dan peralatan yang memerlukan perbaikan.

Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Pendukung

Tabel. 25
Capaian Indikator Kinerja Program Pendukung

No	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target 2024	Target TW II TA. 2024	Realisasi TW II TA. 2024	Capaian (%)
I.	Program Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Terciptanya sistem pelayanan administrasi perkantoran yang memadai	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100%	100%	89,37%	89,37%
1.	Kegiatan Perencanaan,Peng anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun tepat waktu	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu	100%	100%	100%	100%
a.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun tepat waktu	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu	2 Dok	1 Dok	1 Dok	100%
b.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Tersedianya dokumen RKA- SKPD yang disusun tepat waktu	Jumlah dokumen RKA-SKPD yang disusun tepat waktu	2 Dok	0 Dok	0 Dok	0%
c.	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Tersedianya dokumen DPA-SKPD yang disusun tepat waktu	Jumlah dokumen DPA-SKPD yang disusun tepat waktu	2 Dok	1 Dok	1 Dok	100%
d.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya laporan kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu	Jumlah laporan kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu	10 Dok	6 Dok	6 Dok	100%

			5				
2.	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya laporan keuangan perangkat daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Tepat Waktu	100%	100%	99,37%	99,37%
a.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya gaji dan tunjangan ASN	Jumlah ASN yang terbayarkan gaji dan tunjangannya	16 Org	16	15 Org	98,75%
b.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Tersusunnya laporan keuangan bulanan/triwulanan/ semesteran dan akhir tahun dengan baik	Jumlah laporan keuangan perangkat daerah yang disusun tepat waktu	18 Dok	10 Dok	10 Dok	100%
3.	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi dan penatausahaan Barang Milik Daerah pada perangkat daerah	Persentase BMD yang diadministrasi sesuai standar	100%	100%	100%	100%
a.	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah laporan penatausahaan BMD SKPD yang disusun tepat waktu	4 Dok	2 Dok	2 Dok	100%
4.	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersedianya administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persentase Pegawai Perangkat Daerah yang dilayani	100%	100%	100%	100%
a.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Terlaksananya peningkatan kapasitas bagi aparatur	Jumlah pegawai yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang- undangan	18 Org	7 Org	7 Org	100 %
5.	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah	Persentase administrasi umum Perangkat Daerah berjalan sesuai standar	100%	100%	96,16%	96,16%
a.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan untuk bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	8 Jenis	8 Jenis	7 Jenis	87,5%
b.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya bahan logistik untuk kelancaran pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	20 Jenis	20 Jenis	16 Jenis	80%
C.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan untuk kebutuhan kantor	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	3 Jenis	3 Jenis	3 Jenis	100%
d.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	60 Expl	30 Expl	30 Expl	100%
e.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terfasilitasinya makanan dan minuman untuk tamu	Jumlah tamu yang difasilitasi kunjungannya	330 Org	199	195 Org	97,98%

f.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diselenggarakan	41 Kali	26	29 Kali	111,5%
6.	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpenuhinya kebutuhan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase BMD- Perangkat Daerah penunjang yang terpenuhi	100%	100%	33,33%	33,33%
a.	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	Tersedianya kendaraan dinas perorangan atau jabatan	Jumlah kendaraan dinas yang diadakan	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100%
b.	Pengadaan Mebel	Tersedianya mebel untuk penunjang urusan perkantoran	Jumlah mebel yang diadakan	4 Unit	4 Unit	0 Unit	0%
c.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya peralatan/mesin lainnya untuk kebutuhan kantor	Jumlah Peralatan/Mesin Lainnya yang diadakan	4 Unit	4 Unit	0 Unit	0%
d.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya sarana prasana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya untuk penunjang urusan perkantoran	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan	3 Unit	3 Unit	3 Unit	100%
7.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa pendukung dan sarana penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase jasa penunjang urusan yang tersedia	100%	100%	98,44%	98,44%
a.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Teradministrasinya surat masuk dan surat keluar dengan baik	Jumlah surat masuk dan keluar yang diagenda	400 Surat	200 Surat	145 Surat	72,5%
b.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terbayarnya rekening bulanan telepon, air dan listrik kantor demi kelancaran pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah rekening bulanan telepon, air dan listrik kantor yang terbayarkan	36 Rek	18 Rek	22 Rek	122,22 %
C.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya jasa tenaga pelayanan umum kantor untuk penunjang urusan perkantoran	Jumlah jasa tenaga pelayanan umum kantor yang disediakan	2 Org	2 Org	2 Org	100%
8.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang siap pakai	Persentase BMD penunjang urusan yang terpelihara	100%	100%	87,66%	87,66%
a.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional dengan baik	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	13 Unit	13	9 Unit	69,23%

b.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya peralatan dan mesin lainnya dengan baik	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	25 Unit	16 Unit	15 Unit	93,75%
C.	Pemeliharaan/Reha bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya gedung kantor dan bangunan lainnya dengan baik	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilita si	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100%

Dokumentasi Kegiatan Penunjang SKPD









Dokumentasi Pelaksanaan Rapat Monev Internal OPD





Dokumentasi Pengadaan Kendaraan Dinas

7. KESIMPULAN

Capaian Kinerja Sasaran "Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah yaitu 101,6% diperoleh dari rumus perhitungan :

$$= \frac{86,00}{83,06} \times 100$$

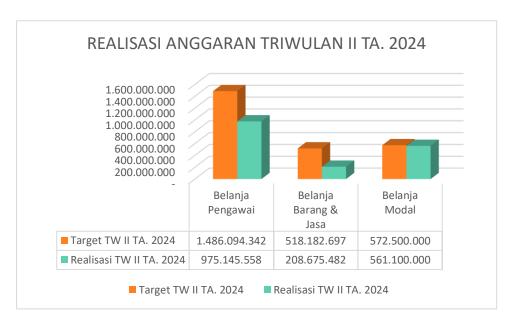
= 103,5%

❖ Alokasi anggaran yang disediakan pada Dokumen DPA-SKPD BPBD Kabupaten Luwu Timur pada Tariwulan II Tahun Anggaran 2024 dalam pencapaian kinerja sasaran yaitu : Rp. 3.363.661.216,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 2.102.529.990,- atau 62,51%.

3.3 Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang telah digunakan serta analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

Anggaran APBD untuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur tahun 2024 adalah sebesar sebesar Rp. 5.172.606.050,- (Lima Milyar Seratus Tujuh Puluh Dua Juta Enam Ratus Enam Ribu Lima Puluh Rupiah), terdiri 2.146.665.782,dari belanja pegawai Rp belanja barang dan jasa Rp. 1.820.552.768,- dan belanja modal Rp 814.650.000,-. Anggaran tersebut digunakan untuk membiayai 2 program, 12 kegiatan serta 38 sub kegiatan. Sedangkan target dan realisasi anggaran pada Triwulan II Tahun Anggaran 2024 dapat dilihat pada grafik berikut ini:



Grafik. 10 Perbandingan Realisasi Anggaran Triwulan II Tahun 2024

Tabel. 26 Realisasi Anggaran Berdasarkan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Triwulan II Tahun Anggaran 2024

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Jumlah Anggaran Pokok Rp	JumlahTarget Triwulan II (Berdasarkan Anggaran Kas)	Jumlah Realisa	si TW II	Selisih		Sisa Anggara	an
			(Rp)	(Rp)	%	(Rp)	(%)	(Rp)	(%)
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	5.172.606.050,00	3.363.661.216,00	2.102.529.990,00	62,51	1.261.131.226,00	37,49	3.070.076.060,00	59,35
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA	3.539.355.020,00	2.585.079.406,00	1.823.900.481,00	70,55	761.178.925,00	29,45	1.715.454.539,00	48,47
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	80.067.880,00	39.152.080,00	17.064.370,00	43,58	22.087.710,00	56,42	63.003.510,00	78,69
1	<u>Penyusunan dokumen</u> <u>Perencanaan Perangkat Daerah</u>	<u>37.836.840,00</u>	<u>19.087.955,00</u>	<u>10.460.000,00</u>	<u>54,80</u>	8.627.955,00	<u>45,20</u>	27.376.840,00	<u>72,35</u>
	Belanja Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan	9.000.000,00	4.500.000,00	3.750.000,00	83,33	750.000,00	16,67	5.250.000,00	58,33
	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.145.770,00	572.885,00	-	-	572.885,00	100,00	1.145.770,00	100,00
	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	459.070,00	459.070,00	-	-	459.070,00	100,00	459.070,00	100,00
	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-Bahan Cetak	2.750.000,00	1.375.000,00	-	-	1.375.000,00	100,00	2.750.000,00	100,00
	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1.662.000,00	831.000,00	-	-	831.000,00	100,00	1.662.000,00	100,00
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.000.000,00	3.000.000,00	-	-	3.000.000,00	100,00	6.000.000,00	100,00
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	16.820.000,00	8.350.000,00	6.710.000,00	80,36	1.640.000,00	19,64	10.110.000,00	60,11
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5.852.560,00	=	<u>=</u>	#DIV/0!	-	#DIV/0!	5.852.560,00	100,00
	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.169.990,00	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	1.169.990,00	100,00
	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	390.570,00	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	390.570,00	100,00
	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-Bahan Cetak	1.200.000,00	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	1.200.000,00	100,00
	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1.292.000,00	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	1.292.000,00	100,00
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.800.000,00	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	1.800.000,00	100,00
<u>3</u>	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	<u>4.365.200,00</u>	<u>2.468.700,00</u>	<u>1.237.700,00</u>	50,14	1.231.000,00	<u>49,86</u>	3.127.500,00	<u>71,65</u>
	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	353.700,00	353.700,00	353.700,00	100,00	-	-	-	-
	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	218.500,00	218.500,00	202.500,00	92,68	16.000,00	7,32	16.000,00	7,32
	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-Bahan Cetak	2.550.000,00	1.275.000,00	451.500,00	35,41	823.500,00	64,59	2.098.500,00	82,29
	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1.243.000,00	621.500,00	230.000,00	37,01	391.500,00	62,99	1.013.000,00	81,50
<u>4</u>	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	32.013.280,00	<u>17.595.425,00</u>	5.366.670,00	<u>30,50</u>	12.228.755,00	<u>69,50</u>	26.646.610,00	<u>83,24</u>
	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.322.710,00	661.355,00	657.100,00	99,36	4.255,00	0,64	665.610,00	50,32
	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	457.570,00	457.570,00	433.570,00	94,75	24.000,00	5,25	24.000,00	5,25
	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-Bahan Cetak	3.000.000,00	1.500.000,00	671.000,00	44,73	829.000,00	55,27	2.329.000,00	77,63
	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-Bahan Komputer	2.993.000,00	1.496.500,00	460.000,00	30,74	1.036.500,00	69,26	2.533.000,00	84,63
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.800.000,00	2.400.000,00	-	-	2.400.000,00	100,00	4.800.000,00	100,00
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	19.440.000,00	11.080.000,00	3.145.000,00	28,38	7.935.000,00	71,62	16.295.000,00	83,82

	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.145.998.382,00	1.488.986.842,00	966.777.758,00	64,93	522.209.084,00	35,07	1.179.220.624,00	54,95
<u>5</u>	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.100.465.782,00	1.462.994.342,00	955.295.558.00	<u>65.30</u>	507.698.784,00	<u>34.70</u>	1.145.170.224,00	<u>54.52</u>
	Belanja Gaji Pokok PNS	788.640.982,00	630.912.786,00	401.587.500,00	63,65	229.325.286,00	36,35	387.053.482,00	49,08
	Belanja Gaji Pokok PPPK	48.774.810,00	39.019.848,00	25.628.800,00	65,68	13.391.048,00	34,32	23.146.010,00	47,45
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	76.463.119,00	61.170.495,00	37.417.834,00	61,17	23.752.661,00	38,83	39.045.285,00	51,06
	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	5.516.966,00	4.413.572,00	-	-	4.413.572,00	100,00	5.516.966,00	100,00
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	128.590.000,00	102.872.000,00	65.380.000,00	63,55	37.492.000,00	36,45	63.210.000,00	49,16
	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	22.680.000,00	18.144.000,00	-	-	18.144.000,00	100,00	22.680.000,00	100,00
	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	2.590.000,00	2.072.000,00	1.295.000,00	62,50	777.000,00	37,50	1.295.000,00	50,00
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	14.457.625,00	11.566.101,00	3.105.000,00	26,85	8.461.101,00	73,15	11.352.625,00	78,52
	Belanja Tunjangan Beras PNS	52.554.840,00	42.043.872,00	21.508.740,00	51,16	20.535.132,00	48,84	31.046.100,00	59,07
	Belanja Tunjangan Beras PPPK	3.041.640,00	2.433.312,00	579.360,00	23,81	1.853.952,00	76,19	2.462.280,00	80,95
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	4.675.000,00	3.740.000,00	6.748.936,00	180,45	(3.008.936,00)	(80,45)	(2.073.936,00)	(44,36)
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	1.400.000,00	1.120.000,00	86.528,00	7,73	1.033.472,00	92,27	1.313.472,00	93,82
	Belanja Pembulatan Gaji PNS	49.400,00	39.520,00	6.921,00	17,51	32.599,00	82,49	42.479,00	85,99
	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	1.400,00	1.120,00	630,00	56,25	490,00	43,75	770,00	55,00
	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja PNS Tambahan Penghasilan	905.940.000,00	517.680.000,00	388.779.848,00	75,10	128.900.152,00	24,90	517.160.152,00	57,09
	Berdasarkan Beban Kerja PPPK	11.130.000,00	6.360.000,00	3.170.461,00	49,85	3.189.539,00	50,15	7.959.539,00	71,51
	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja PNS	33.960.000,00	19.405.716,00	-	-	19.405.716,00	100,00	33.960.000,00	100,00
<u>6</u>	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	<u>45.532.600,00</u>	<u>25.992.500,00</u>	<u>11.482.200,00</u>	<u>44,18</u>	14.510.300,00	<u>55,82</u>	34.050.400,00	<u>74,78</u>
	Belanja Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan	19.800.000,00	9.900.000,00	9.250.000,00	93,43	650.000,00	6,57	10.550.000,00	53,28
	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.585.600,00	1.292.800,00	636.600,00	49,24	656.200,00	50,76	1.949.000,00	75,38
	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	1.324.000,00	662.000,00	647.000,00	97,73	15.000,00	2,27	677.000,00	51,13
	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-Bahan Cetak	1.145.000,00	572.500,00	488.600,00	85,34	83.900,00	14,66	656.400,00	57,33
	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1.838.000,00	1.225.200,00	460.000,00	37,54	765.200,00	62,46	1.378.000,00	74,97
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.500.000,00	1.000.000,00	-	-	1.000.000,00	100,00	1.500.000,00	100,00
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	5.340.000,00	5.340.000,00	-		5.340.000,00	100,00	5.340.000,00	100,00
	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	12.000.000,00	6.000.000,00	-	-	6.000.000,00	100,00	12.000.000,00	100,00
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	20.326.300,00	13.248.300,00	5.250.000,00	39,63	7.998.300,00	60,37	15.076.300,00	74,17
<u>7</u>	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	20.326.300,00	<u>13.248.300,00</u>	5.250.000,00	<u>39,63</u>	7.998.300,00	<u>60,37</u>	15.076.300,00	<u>74,17</u>
	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	12.600.000,00	6.300.000,00	5.250.000,00	83,33	1.050.000,00	16,67	7.350.000,00	58,33
	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	543.300,00	543.300,00	-	-	543.300,00	100,00	543.300,00	100,00
	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	347.000,00	347.000,00	-	-	347.000,00	100,00	347.000,00	100,00
	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-Bahan Cetak	644.000,00	322.000,00	-	-	322.000,00	100,00	644.000,00	100,00
	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-Bahan Komputer	912.000,00	456.000,00	-	-	456.000,00	100,00	912.000,00	100,00

	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	5 000 000 00	5 000 000 00			F 000 000 00	100.00	5 000 000 00	400.00
	Administrasi Kepegawaian	5.280.000,00	5.280.000,00	40 707 000 00	-	5.280.000,00	100,00	5.280.000,00	100,00
Q	Perangkat Daerah Bimbingan Teknis Implementasi	35.500.000,00	27.610.000,00	13.727.000,00	49,72	13.883.000,00	50,28	21.773.000,00	61,33
<u>8</u>	Peraturan Perundang-Undangan	<u>35.500.000,00</u>	<u>27.610.000,00</u>	13.727.000,00	<u>49,72</u>	13.883.000,00	<u>50,28</u>	21.773.000,00	<u>61,33</u>
	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	15.000.000,00	15.000.000,00	5.770.000,00	38,47	9.230.000,00	61,53	9.230.000,00	61,53
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa Administrasi Umum Perangkat	20.500.000,00	12.610.000,00	7.957.000,00	63,10	4.653.000,00	36,90	12.543.000,00	61,19
-	Daerah	396.921.800,00	247.126.870,00	202.704.689,00	82,02	44.422.181,00	17,98	194.217.111,00	48,93
<u>9</u>	Penyediaaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	<u>12.625.000,00</u>	<u>6.312.500,00</u>	948.000,00	<u>15,02</u>	5.364.500,00	<u>84,98</u>	11.677.000,00	<u>92,49</u>
	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-Alat Listrik	12.625.000,00	6.312.500,00	948.000,00	15,02	5.364.500,00	84,98	11.677.000,00	92,49
<u>10</u>	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	<u>24.994.500,00</u>	<u>12.497.250,00</u>	6.100.000,00	<u>48.81</u>	6.397.250,00	<u>51,19</u>	18.894.500,00	<u>75,59</u>
	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	17.407.000,00	8.703.500,00	6.100.000,00	70,09	2.603.500,00	29,91	11.307.000,00	64,96
	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	7.587.500,00	3.793.750,00	-	-	3.793.750,00	100,00	7.587.500,00	100,00
<u>11</u>	Penyediaaan Barang Cetakan dan Penggandaan	24.867.500,00	18.140.000,00	9.830.000,00	<u>54,19</u>	8.310.000,00	<u>45,81</u>	15.037.500,00	60,47
	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-Bahan Cetak	24.867.500,00	18.140.000,00	9.830.000,00	54,19	8.310.000,00	45,81	15.037.500,00	60,47
<u>12</u>	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	6.720.000,00	3.360.000,00	2.210.000,00	<u>65,77</u>	1.150.000,00	34,23	4.510.000,00	<u>67,11</u>
	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	6.720.000,00	3.360.000,00	2.210.000,00	65,77	1.150.000,00	34,23	4.510.000,00	67,11
<u>13</u>	Fasilitas Kunjungan Tamu	<u>18.150.000,00</u>	<u>11.000.000,00</u>	=	Ξ	11.000.000,00	<u>100,00</u>	18.150.000,00	<u>100,00</u>
	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	18.150.000,00	11.000.000,00	•	-	11.000.000,00	100,00	18.150.000,00	100,00
<u>14</u>	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	309.564.800,00	<u>195.817.120,00</u>	<u>183.616.689,00</u>	<u>93,77</u>	12.200.431,00	<u>6,23</u>	125.948.111,00	40,69
	Belanja Jasa Tenaga Supir	36.000.000,00	18.000.000,00	7.500.000,00	41,67	10.500.000,00	58,33	28.500.000,00	79,17
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	273.564.800,00	177.817.120,00	176.116.689,00	99,04	1.700.431,00	0,96	97.448.111,00	35,62
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	658.000.000,00	658.000.000,00	561.100.000,00	85,27	96.900.000,00	14,73	96.900.000,00	14,73
15	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	555.500.000,00	555.500.000,00	545.500.000,00	98,20	10.000.000,00	1,80	10.000.000,00	1,80
	Belanja Modal Kendaran Bermotor Penumpang (MOBIL)	555.500.000,00	555.500.000,00	545.500.000,00	98,20	10.000.000,00	1,80	10.000.000,00	1,80
<u>16</u>	Pengadaan Mebel	26.500.000,00	26.500.000,00	=	=	26.500.000,00	<u>100,00</u>	26.500.000,00	100,00
	Belanja Modal Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor (FILLING KABINET 1 unit, LEMARI ARSIP 3 unit)	26.500.000,00	26.500.000,00	-	-	26.500.000,00	100,00	26.500.000,00	100,00
<u>17</u>	Pengadaan Peralatan dan Mesin	59.000.000,00	59.000.000,00	<u>-</u>	<u>-</u>	59.000.000,00	100,00	59.000.000,00	100,00
-	Lainnya Belanja Modal Alat Pembersih (MESIN BABAT 1 unit)	5.000.000,00	5.000.000,00	-	=	5.000.000,00	100,00	5.000.000,00	100,00
	Belanja Modal Personal Computer (KOMPUTER/PC 3 unit)	54.000.000,00	54.000.000,00	-	-	54.000.000,00	100,00	54.000.000,00	100,00
<u>18</u>	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukun Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	<u>17.000.000,00</u>	<u>17.000.000,00</u>	<u>15.600.000,00</u>	<u>91,76</u>	1.400.000,00	<u>8,24</u>	1.400.000,00	<u>8,24</u>
	Belanja Modal Alat Pendingin (AC 1/2 Pk 2 Unit, AC 1Pk 1 Unit)	17.000.000,00	17.000.000,00	15.600.000,00	91,76	1.400.000,00	8,24	1.400.000,00	8,24
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	79.820.658,00	40.854.314,00	27.377.664,00	67,01	13.476.650,00	32,99	52.442.994,00	65,70
<u>19</u>	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.199.970,00	3.043.970,00	1.726.000,00	<u>56,70</u>	1.317.970,00	<u>43,30</u>	2.473.970,00	<u>58,90</u>

	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.175.340,00	1.475.340,00	694.500,00	47,07	780.840,00	52,93	1.480.840,00	68,07
	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	462.630,00	462.630,00	306.500,00	66,25	156.130,00	33,75	156.130,00	33,75
	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-Benda Pos	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00	-	-	-	-
	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-Bahan Komputer	912.000,00	456.000,00	225.000,00	49,34	231.000,00	50,66	687.000,00	75,33
	Belanja Paket/Pengiriman	150.000,00	150.000,00	-	-	150.000,00	100,00	150.000,00	100,00
<u>20</u>	Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	<u>55.820.688,00</u>	27.910.344,00	<u>17.801.664,00</u>	<u>63,78</u>	10.108.680,00	<u>36,22</u>	38.019.024,00	<u>68,11</u>
	Belanja Tagihan Telpon	1.800.000,00	900.000,00	623.400,00	69,27	276.600,00	30,73	1.176.600,00	65,37
	Belanja Tagihan Air	6.004.800,00	3.002.400,00	2.014.900,00	67,11	987.500,00	32,89	3.989.900,00	66,45
	Belanja Tagihan Listrik	48.015.888,00	24.007.944,00	15.163.364,00	63,16	8.844.580,00	36,84	32.852.524,00	68,42
<u>21</u>	<u>Penyediaan Jasa Pelayanan</u> <u>Umum Kantor</u>	<u>19.800.000,00</u>	<u>9.900.000,00</u>	<u>7.850.000,00</u>	<u>79.29</u>	2.050.000,00	<u>20.71</u>	11.950.000,00	<u>60.35</u>
	Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)	4.800.000,00	2.400.000,00	1.600.000,00	66,67	800.000,00	33,33	3.200.000,00	66,67
	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	15.000.000,00	7.500.000,00	6.250.000,00	83,33	1.250.000,00	16,67	8.750.000,00	58,33
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Umum Pemerintahan Daerah	122.720.000,00	70.101.000,00	29.899.000,00	42,65	40.202.000,00	57,35	92.821.000,00	75,64
<u>22</u>	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	93.300.000.00	<u>51.400.000.00</u>	22.905.000.00	<u>44.56</u>	28.495.000,00	<u>55,44</u>	70.395.000,00	<u>75.45</u>
-	Belanja pembayaran pajak, bea, dan perizinan	11.600.000,00	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	11.600.000,00	100,00
	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	12.800.000,00	6.400.000,00	1.965.000,00	30,70	4.435.000,00	69,30	10.835.000,00	84,65
	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	68.900.000,00	45.000.000,00	20.940.000,00	46,53	24.060.000,00	53,47	47.960.000,00	69,61
<u>23</u>	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	<u>19.540.000,00</u>	12.701.000,00	<u>1.350.000,00</u>	<u>10,63</u>	11.351.000,00	<u>89,37</u>	18.190.000,00	93,09
	Belanja Pemeliharaan Alat Berat- Alat Bantu-ElectrikGenerating Set	4.500.000,00	2.925.000,00	-	-	2.925.000,00	100,00	4.500.000,00	100,00
	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor -Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Lainnya	1.400.000,00	910.000,00	-	-	910.000,00	100,00	1.400.000,00	100,00
	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor- Alat Kantor Lainnya (chainsaw, tenda)	2.800.000,00	1.820.000,00	-	-	1.820.000,00	100,00	2.800.000,00	100,00
	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor- Alat Pendingin	3.000.000,00	1.950.000,00	600.000,00	30,77	1.350.000,00	69,23	2.400.000,00	80,00
	Belanja Pemeliharaan Komputer- Komputer Unit-Personal Computer (Komputer/PC, Laptop)	5.840.000,00	3.796.000,00	750.000,00	19,76	3.046.000,00	80,24	5.090.000,00	87,16
	Belanja Pemeliharaan Komputer- Peralatan Komputer -Peralatan Personal Computer (Printer)	2.000.000,00	1.300.000,00	-	-	1.300.000,00	100,00	2.000.000,00	100,00
<u>24</u>	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	<u>9.880.000,00</u>	<u>6.000.000,00</u>	<u>5.644.000,00</u>	<u>94,07</u>	356.000,00	<u>5,93</u>	4.236.000,00	<u>42,87</u>
	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	9.880.000,00	6.000.000,00	5.644.000,00	94,07	356.000,00	5,93	4.236.000,00	42,87
	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.633.251.030,00	778.581.810,00	278.629.509,00	35,79	499.952.301,00	64,21	1.354.621.521,00	82,94

	Pelayanan Informasi Rawan		I						
	Bencana Kabupaten/Kota	116.395.070,00	116.395.070,00		-	116.395.070,00	100,00	116.395.070,00	100,00
<u>25</u>	Sosialisasi, Komonikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	<u>116.395.070,00</u>	<u>116.395.070,00</u>	=	<u>-</u>	116.395.070,00	<u>100,00</u>	116.395.070,00	<u>100,00</u>
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor	4.047.500,00	4.047.500,00	-	-	4.047.500,00	100,00	4.047.500,00	100,00
	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	180.570,00	180.570,00	-	-	180.570,00	100,00	180.570,00	100,00
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak	755.000,00	755.000,00	-	-	755.000,00	100,00	755.000,00	100,00
	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-Bahan Komputer	532.000,00	532.000,00	-	-	532.000,00	100,00	532.000,00	100,00
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	11.000.000,00	11.000.000,00	-	-	11.000.000,00	100,00	11.000.000,00	100,00
	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	5.500.000,00	5.500.000,00	-	-	5.500.000,00	100,00	5.500.000,00	100,00
	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	1.080.000,00	1.080.000,00	-	-	1.080.000,00	100,00	1.080.000,00	100,00
	Belanja Sewa Hotel	900.000,00	900.000,00	-	-	900.000,00	100,00	900.000,00	100,00
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1.500.000,00	1.500.000,00	-	-	1.500.000,00	100,00	1.500.000,00	100,00
	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya (PAPAN HIMBAUAN 3 Unit)	90.900.000,00	90.900.000,00	-	-		-	90.900.000,00	100,00
	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	257.723.360,00	138.765.550,00	36.712.100,00	26,46	102.053.450,00	73,54	221.011.260,00	85,76
<u>26</u>	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan (Desa Tangguh Bencana)	<u>57.937.060,00</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	#DIV/0!	-	#DIV/0!	57.937.060,00	<u>100,00</u>
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor	434.420,00	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	434.420,00	100,00
	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	580.640,00	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	580.640,00	<u>100,00</u>
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak	1.230.000,00	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	1.230.000,00	<u>100,00</u>
	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-Bahan Komputer	542.000,00	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	542.000,00	<u>100,00</u>
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	13.200.000,00	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	13.200.000,00	100,00
	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	23.750.000,00	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	23.750.000,00	100,00
	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	1.080.000,00	-	<u>-</u>	#DIV/0!	-	#DIV/0!	1.080.000,00	<u>100,00</u>
	Belanja Sewa Hotel	5.400.000,00	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	5.400.000,00	100,00
27	Belanja Perjalanan Dinas Biasa Pengembangan Kapasitas Tim	11.720.000,00	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	11.720.000,00	100,00
	Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	35.877.450,00	35.877.450,00	-	-	35.877.450,00	100,00	35.877.450,00	100,00
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor	919.880,00	919.880,00	-	-	919.880,00	100,00	919.880,00	100,00
	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	105.570,00	105.570,00	-	-	105.570,00	100,00	105.570,00	100,00
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak	1.510.000,00	1.510.000,00	-	-	1.510.000,00	100,00	1.510.000,00	<u>100,00</u>
	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-Bahan Komputer	162.000,00	162.000,00	-	-	162.000,00	100,00	162.000,00	100,00
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8.800.000,00	8.800.000,00	-	-	8.800.000,00	100,00	8.800.000,00	100.00
	Belanja Pakaian Pelatihan Kerja	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	5.000.000,00	100,00	5.000.000,00	100,00
	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	10.000.000,00	10.000.000,00	-	-	10.000.000,00	100,00	10.000.000,00	100,00
	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	1.080.000,00	1.080.000,00	-	-	1.080.000,00	100,00	1.080.000,00	<u>100,00</u>

	B								
	Belanja sewa bangunan gedung tempat pertemuan	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	3.000.000,00	100,00	3.000.000,00	<u>100,00</u>
	Belanja Sewa Hotel	1.800.000,00	1.800.000,00	-	-	1.800.000,00	100,00	1.800.000,00	100.00
28	Belanja Perjalanan Dinas Biasa Gladi Kesiapsiagaan Terhadap	3.500.000,00	3.500.000,00	-	-	3.500.000,00	100,00	3.500.000,00	<u>100,00</u>
20	<u>Bencana</u>	37.138.100,00	37.138.100,00	36.712.100,00	98,85	426.000,00	1,15	426.000,00	<u>1,15</u>
	Belanja Bahan bahan lainnya	5.000.000,00	5.000.000,00	4.677.000,00	93,54	323.000,00	6,46	323.000,00	<u>6,46</u>
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor	271.530,00	271.530,00	271.530,00	100,00	-	-	-	=
	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	228.570,00	228.570,00	228.570,00	100,00	-	-	-	=
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak	1.175.000,00	1.175.000,00	1.175.000,00	100,00	-	-	-	<u>-</u>
	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-Bahan Komputer	613.000,00	613.000,00	550.000,00	89,72	63.000,00	10,28	63.000,00	<u>10,28</u>
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	16.200.000,00	16.200.000,00	16.200.000,00	100,00	-	-	-	=
	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	8.250.000,00	8.250.000,00	8.250.000,00	100,00	-	-	-	=
	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	1.200.000,00	1.200.000,00	1.160.000,00	96,67	40.000,00	3,33	40.000,00	<u>3,33</u>
	Belanja Sewa Alat Studio Lainnya	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00	-	-	-	=
	Belanja Sewa Hotel	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	100,00	-	-	-	<u>-</u>
<u>29</u>	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	61.020.750,00	<u>-</u>	<u>-</u>	#DIV/0!	-	<u>#DIV/0!</u>	61.020.750,00	<u>100,00</u>
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor	1.781.680,00	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	1.781.680,00	<u>100,00</u>
	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	187.070,00	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	187.070,00	<u>100,00</u>
	Belanja alat atau bahan untuk kegiatan kantor-bahan cetak	1.440.000,00	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	1.440.000,00	<u>100,00</u>
	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-Bahan Komputer	532.000,00	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	532.000,00	<u>100,00</u>
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.300.000,00	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	7.300.000,00	<u>100,00</u>
	Belanja Pakaian Pelatihan Kerja	11.500.000,00	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	11.500.000,00	<u>100,00</u>
	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	11.500.000,00	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	11.500.000,00	100,00
	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	11.080.000,00	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	11.080.000,00	<u>100,00</u>
	Belanja sewa bangunan gedung tempat pertemuan	3.000.000,00	-	-			#DIV/0!	3.000.000,00	100,00
	Belanja Sewa Hotel	5.400.000,00	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	5.400.000,00	100,00
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	7.300.000,00	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	7.300.000,00	100,00
<u>30</u>	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasaranan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	65.750.000,00	65.750.000,00	<u> </u>	Ξ	65.750.000,00	<u>100,00</u>	65.750.000,00	<u>100,00</u>
	Belanja Modal Alat kantor lainnya (Chainsaw 2 Unit)	35.000.000,00	35.000.000,00	-	-	35.000.000,00	100,00	35.000.000,00	100,00
	Belanja Modal Alat SAR Lainnya (Helm sefety15 bh, jasa hujan 30 bh, sepatu Boat 30 psg)	30.750.000,00	30.750.000,00	-	-	30.750.000,00	100,00	30.750.000,00	100,00
	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	752.737.140,00	387.508.870,00	232.084.400,00	59,89	155.424.470,00	40,11	520.652.740,00	<u>69,17</u>
<u>31</u>	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	625.230.900,00	<u>314.007.030,00</u>	219.613.400,00	69,94	94.393.630,00	30,06	405.617.500,00	<u>64,87</u>
	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	8.400.000,00	4.200.000,00	-	-	4.200.000,00	100,00	8.400.000,00	<u>100,00</u>
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	317.900,00	222.530,00	-	-	222.530,00	100,00	317.900,00	<u>100,00</u>
	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	574.000,00	287.000,00	-	-	287.000,00	100,00	574.000,00	<u>100,00</u>

	Belanja alat atau bahan untuk								
	kegiatan kantor-bahan cetak Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan	175.000,00	87.500,00	-	-	87.500,00	100,00	175.000,00	100,00
	Kantor-Bahan Komputer	324.000,00	162.000,00	-	-	162.000,00	100,00	324.000,00	<u>100.00</u>
	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana	602.160.000,00	301.080.000,00	212.190.000,00	70,48	88.890.000,00	29,52	389.970.000,00	<u>64,76</u>
20	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	13.280.000,00	7.968.000,00	7.423.400,00	93,17	544.600,00	6,83	5.856.600,00	<u>44,10</u>
<u>32</u>	<u>Pencarian,Pertolongan dan</u> <u>Evakuasi Korban Bencana</u> <u>Kabupaten/Kota</u>	<u>39.175.000,00</u>	<u>23.071.000.00</u>	<u>4.658.000.00</u>	20,19	18.413.000,00	79,81	34.517.000,00	<u>88,11</u>
	Belanja Bahan-Bahan Dan Pelumas	15.170.000,00	9.860.500,00	-	-	9.860.500,00	100,00	15.170.000,00	<u>100,00</u>
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.000.000,00	1.000.000,00	-	-	1.000.000,00	100,00	2.000.000,00	<u>100,00</u>
	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	1.925.000,00	962.500,00	-	-	962.500,00	100,00	1.925.000,00	<u>100,00</u>
	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	8.000.000,00	4.000.000,00	-	-	4.000.000,00	100,00	8.000.000,00	<u>100,00</u>
22	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	12.080.000,00	7.248.000,00	4.658.000,00	64,27	2.590.000,00	35,73	7.422.000,00	<u>61,44</u>
<u>33</u>	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	<u>39.073.600,00</u>	<u>24.180.000,00</u>	<u>7.813.000,00</u>	32,31	16.367.000,00	67,69	31.260.600,00	<u>80,00</u>
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	258.600,00	258.600,00	-	-	258.600,00	100,00	258.600,00	<u>100.00</u>
	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	562.000,00	562.000,00	-	-	562.000,00	100,00	562.000,00	<u>100,00</u>
	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-Bahan Komputer	993.000,00	993.000,00	-	-	993.000,00	100,00	993.000,00	<u>100,00</u>
	Belanja persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga-persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga	10.000.000,00	6.000.000,00	-	-	6.000.000,00	100,00	10.000.000,00	100,00
	Belanja Paket/Pengiriman	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	5.000.000,00	100,00	5.000.000,00	<u>100,00</u>
	Belanja Sewa Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	4.500.000,00	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	4.500.000,00	<u>100.00</u>
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	17.760.000,00	11.366.400,00	7.813.000,00	68,74	3.553.400,00	31,26	9.947.000,00	<u>56,01</u>
<u>34</u>	Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit	<u>28.797.040,00</u>	<u>16.397.040,00</u>	Ξ	-	16.397.040,00	100,00	28.797.040,00	100,00
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	524.400,00	524.400,00	•	-	524.400,00	100,00	524.400,00	<u>100,00</u>
	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	610.640,00	610.640,00	-	-	610.640,00	100,00	610.640,00	<u>100,00</u>
	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-Bahan Komputer	162.000,00	162.000,00	-	-	162.000,00	100,00	162.000,00	<u>100,00</u>
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.000.000,00	1.600.000,00	-	-	1.600.000,00	100,00	4.000.000,00	<u>100,00</u>
	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	3.000.000,00	1.200.000,00	-	-	1.200.000,00	100,00	3.000.000,00	<u>100,00</u>
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	20.500.000,00	12.300.000,00	-	-	12.300.000,00	100,00	20.500.000,00	<u>100,00</u>
35	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	20.460.600,00	9.853.800,00	-	-	9.853.800,00	100,00	20.460.600,00	<u>100,00</u>
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	230.600,00	115.300,00	-	-	115.300,00	100,00	230.600,00	<u>100,00</u>
	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	321.000,00	321.000,00	-	-	321.000,00	100,00	321.000,00	<u>100,00</u>
	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-Bahan Komputer	669.000,00	334.500,00	-	-	334.500,00	100,00	669.000,00	<u>100,00</u>
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.000.000,00	2.000.000,00	-	-	2.000.000,00	100,00	4.000.000,00	<u>100,00</u>
	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	4.500.000,00	2.250.000,00	-	-	2.250.000,00	100,00	4.500.000,00	<u>100,00</u>
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	10.740.000,00	4.833.000,00	-	-	4.833.000,00	100,00	10.740.000,00	<u>100,00</u>

	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	506.395.460,00	135.912.320,00	9.833.009,00	7,23		-	496.562.451,00	<u>98,06</u>
<u>36</u>	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota (Perbup & SOP)	<u>18.139.860,00</u>	<u>11.539.860,00</u>	=	-	11.539.860,00	100,00	18.139.860,00	<u>100,00</u>
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	571.790,00	571.790,00	-	_	571.790,00	100,00	571.790,00	<u>100.00</u>
	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	324.070,00	324.070,00	-	-	324.070,00	100,00	324.070,00	100,00
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	600.000,00	600.000,00	-	-	600.000,00	100,00	600.000,00	100,00
	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1.044.000,00	1.044.000,00	-	-	1.044.000,00	100,00	1.044.000,00	<u>100,00</u>
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.000.000,00	3.000.000,00	-	-	3.000.000,00	100,00	4.000.000,00	<u>100,00</u>
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	11.600.000,00	6.000.000,00	-	-	6.000.000,00	100,00	11.600.000,00	<u>100,00</u>
<u>37</u>	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota (IKD)	62.553.580,00	29.969.580,00	Ξ	-	29.969.580,00	100,00	62.553.580,00	100,00
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor	3.326.870,00	1.856.870,00	-	-	1.856.870,00	100,00	3.326.870,00	<u>100,00</u>
	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	329.710,00	329.710,00	•	-	329.710,00	100,00	329.710,00	<u>100,00</u>
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak	895.000,00	360.000,00	-	-	360.000,00	100,00	895.000,00	100,00
	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-Bahan Komputer	912.000,00	243.000,00	-	-	243.000,00	100,00	912.000,00	<u>100,00</u>
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8.500.000,00	4.000.000,00	-	-	4.000.000,00	100,00	8.500.000,00	<u>100,00</u>
	Belanja Pakaian Pelatihan Kerja	15.000.000,00	10.000.000,00	-	-		-	15.000.000,00	<u>100,00</u>
	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	14.500.000,00	5.250.000,00	-	-	5.250.000,00	100,00	14.500.000,00	<u>100,00</u>
	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	2.160.000,00	1.080.000,00	-	-	1.080.000,00	100,00	2.160.000,00	100,00
	Belanja sewa bangunan gedung tempat pertemuan	4.500.000,00	1.500.000,00	-	-		-	4.500.000,00	<u>100,00</u>
	Belanja Sewa Hotel	2.700.000,00	900.000,00	-	-	900.000,00	100,00	2.700.000,00	<u>100,00</u>
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	9.730.000,00	4.450.000,00	•	-	4.450.000,00	100,00	9.730.000,00	<u>100,00</u>
<u>38</u>	Koordinasi Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota	425.702.020,00	94.402.880,00	9.833.009,00	10,42	84.569.871,00	89,58	415.869.011,00	97,69
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor	605.380,00	605.380,00	276.250,00	45,63	329.130,00	54,37	329.130,00	<u>54,37</u>
	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	1.024.140,00	650.000,00	306.350,00	47,13	343.650,00	52,87	717.790,00	<u>70,09</u>
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak	350.000,00	200.000,00	-	-	200.000,00	100,00	350.000,00	<u>100,00</u>
	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-Bahan Komputer	375.000,00	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	375.000,00	100.00
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.200.000,00	1.200.000,00	-	-	1.200.000,00	100,00	1.200.000,00	<u>100.00</u>
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	31.410.000,00	26.010.000,00	9.250.409,00	35,56	16.759.591,00	64,44	22.159.591,00	<u>70,55</u>
	Belanja Modal Pengawasan Pembangunan Jembatan pada jalan desa (Ds Kawata Kec. Wasuponda)	89.737.500,00	15.737.500,00	-	-	15.737.500,00	100,00	89.737.500,00	<u>100,00</u>
	Belanja Modal Pengawasan Bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam (Rekonstruksi Tanggul Banjir Ds lauwo Kec, Burau)	301.000.000,00	50.000.000,00		-	50.000.000,00	100,00	301.000.000,00	<u>100,00</u>

JUMLAH	E 470 COC 0E0 00	2 202 004 240 00	2 402 520 000 00	CO E4	4 204 424 220 00	27.40	2.070.070.000.00	E0 2E
	5.172.606.050,00	3.363.661.216,00	2.102.529.990,00	62,51	1.261.131.226,00	37,49	3.070.076.060,00	59,35

Permasalahan dan Solusi terkait Penyerapan Anggaran Triwulan II TA. 2024

> Tabel.27 Permasalahan dan Solusi

	ко	DE KE	GIATAN		PROGRAM/KEGIATAN	PERMASALAHAN TERKAIT PENCAPAIAN KINERJA (SECARA TEKNIS BAIK FAKTOR INTERNAL MAUPUN FAKTOR EKSTERNAL)	PERMASALAHAN TERKAIT REALISASI KEUANGAN	SOLUSI
		(1)			(2)	(3)	(4)	(5)
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB PELAYANAN DASAR	YANG BERKAITAN DENGAN		
1	05				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT			
1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA			-
1	05	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
1	05	01	2.01	01	Penyusunan dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Indikator output sub kegiatan yaitu Jumlah dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu sebanyak 2 dokumen. Berdasarkan anggaran kas, output sub kegiatan direncanakan pada triwulan II TA. 2023 sebanyak 1 dokumen dan telah terealisasi 1 dokumen yaitu dokumen renja pokok 2024 dengan capaian kinerja 100%	Disediakan anggaran kas pada triwulan II sebesar Rp 19.087.955,- terdiri dari Belanja Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan (Honorarium Pejabat Perencana SKPD) Rp.4.500.000, Belanja ATK Rp. 572.885, Belanja Kertas Cover RP. 459.070, Belanja Cetak Rp. 1.375.000, Belanja Bahan Komputer Rp. 831.000, Belanja Makan Minum Rapat Rp. 3.000.000 dan Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp. 8.350.000 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 10.460.000 atau sebesar 54,79%. Realisasi keuangan tidak mencapai target karena masih terdapat Belanja E-Catalog senilai Rp 2.762.949 dan belanja Honor Rp 750.000 yang baru akan diGU-kan bulan Juli 2024	Percepatan Realisasi Keuangan untuk belanja E- catalog
1	05	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Indikator output sub kegiatan adalah Jumlah dokumen RKA- SKPD yang disusun tepat waktu sebanyak 2 dokumen, direncanakan pada Triwulan III TA. 2023		
1	05	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Target output sub kegiatan s.d triwulan II yaitu tersusunnya dokumen DPA-SKPD Tahun 2024 dengan capaian kinerja 100%	Disediakan anggaran kas s.d triwulan II sebesar Rp 2.468.700,-,- terdiri dari Belanja ATK Rp 353.700,- Belanja Kertas & Cover Rp 218.500,- belanja cetak Rp 1.275.000, Belanja Bahan Komputer Rp 621.500,- dan Realisasi keuangan sebesar Rp. 1.237.700,- atau sebesar 50,14%. Terdapat Belanja E-Catalog sebesar Rp 851.500 yang baru akan diGU-kan pada bulan Juli 2024	Agar PPTK segera merampungkan SPJ pertanggungjawaban keuangan

1	05	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Target output sub kegiatan s.d triwulan II yaitu tersusunnya 6 dokumen yaitu LKPJ, LPPD, LAKIP dan Laporan Evaluasi Kinerja TW 4 TA. 2023, Laporan Evaluasi RKPD TW I TA. 2024 dan Laporan Kinerja Triwulan I TA. 2024 dengan capaiani kinerja 100%	Disediakan anggaran kas s.d triwulan II sebesar Rp 17.595.425,- terdiri dari Belanja ATK Rp 661.355,- Belanja Kertas & Cover Rp 457.570,- belanja cetak Rp 1.500.000, Belanja Bahan Komputer Rp 1.496.500,- ,belanja makan dan minum rapat Rp 2.400.000 dan Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp 11.080.000,- Realisasi sebesar Rp. 5.366.670 atau sebesar Rp. 5.366.670 atau sebesar 30,50%. erdapat belanja E-Catalog senilai Rp 1.714.520 yang belum di-GU-kan sedangkan belanja perjalanan dinas disesuaikan dengan undangan kegiatan terkait evaluasi.	Agar PPTK segera merampungkan SPJ pertanggungjawaban keuangan
1	05	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
1	05	01	202	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Indikator output sub kegiatan adalah Jumlah ASN yang gaji dan tunjangan terbayarkan sebanyak 16 org dan terealisasi hanya 15 org sehingga capaian kinerja 93,75 %. Hal ini disebabkan karena adanya jabatan fungsional penyetaraan yang belum terisi ASN	Disediakan anggaran kas s.d triwulan II sebesar Rp 1.462.994.342,- dan realisasi Rp 955.295.558,- atau sebesar 65,30%. Terdapat sisa anggaran yang cukup besar karena beberapa jabatan yang belum terisi personilnya sehingga berdampak pada realisasi keuangan	
1	05	01	202	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Indikator output sub kegiatan adalah Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD yang disusun Tepat Waktu. Target s.d triwulan II sebanyak 10 dokumen dan realisasi 10 dokumen yaitu Laporan Keuangan Tahun 2023 sebanyak 1 dok, Laporan Triwulanan 2 dok, Laporan Bulanan Bendahara 6 dok dan Laporan semester 1 dokumen dengan capaian kinerja 100%	Disediakan anggaran kas s.d triwulan II sebesar Rp 25.992.500,-, terdiri dari belanja honor pengelola keuangan Rp 9.900.000, belanja ATK Rp 1.292.800,- Belanja kertas & cover Rp 662.000,- Belanja bahan komputer Rp 1.225.200,- Belanja Cetak Rp 572.500,- belanja makan dan minum rapat Rp 1.000.000,- belanja dan belanja perjalanan dinas Rp 5.340.000. Belanja jasa tenaga administrasi Rp 6.000.000,- Realisasi keuangan Rp. 11.482.200,- atau sebesar 44,18%. Terdapat SPJ sebesar Rp 5.211.340,- yang belum diGU-kan terdiri dari Belanja E-Catalog Rp 985.340,- dan Perjalanan Dinas Rp 4.226.000,- Sedangkan belanja honor upah jasa administrasi tidak realisasi karena masih kosong personilnya	Agar PPTK segera merampungkan SPJ pertanggungjawaban keuangan
1	05	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada SKPD			

1	05	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Indikator output sub kegiatan adalah Jumlah dokumen laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD yang disusun dan target s.d triwulan II sebanyak 2 dokumen dan realisasi 2 dokumen dengan capaian kinerja 100%	Disediakan anggaran kas s.d triwulan II sebesar Rp 13.248.300,- terdiri dari belanja honor pengurus barang Rp 6.300.000, Belanja ATK Rp 543.300,- Belanja kertas & Cover Rp 347.000,- Belanja Cetak Rp 322.000,- Belanja Bahan Komputer Rp 456.000,- Dan Realisasi sebesar Rp. 5.250.000 atau sebesar 39,63%. Hal ini disebabkan karena Terdapat belanja ATK, Kertas & Cover, cetak dan bahan komputer masih dalam proses E-Catalog sedangkan perjalanan dinas disediakan untuk penyusunan laporan tetapi s.d triwulan II, penyusunan laporan dilakukan dilingkup Kab. Luwu Timur sehingga belanja perjalanan dinasnya belum digunakan.	Agar PPTK segera melakukan percepatan belanja E-Catalog
1	05	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			
1	05	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi peraturan perundang-undangan	Indikator output sub kegiatan adalah Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang - undangan, target pada triwulan II sebanyak 7 orang dan terealisasi 7 org (Bimtek Manajemen Bencana Tingkat Operator metode non klasikal =1 org Diklat Manajemen Dasar Bencana = 1 orang, Bimtek Pengangaran TAPD = 1 org, Bimtek Perencanaaan Keuangan Daerah = 2 org, Bimtek Pengelola sisten BMD=1 org dan Bimtek PPK Type-C = 1 org) dengan capaian kinerja 100%. Pelaksanaan sub kegiatan berdasarkan undangan ataupun pemanggilan peserta.	Disediakan anggaran kas s.d triwulan II sebesar Rp 27.610.000,- terdiri dari belanja kontribusi bimtek Rp 15.000.000 dan belanja perjalanan dinas Rp 12.610.000. dan realisasi Rp 13.727.000,- atau sebesar 49,72%. Realisasi keuangan disesuaikan dengan undangan atau pemanggilan peserta	
1	05	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			
1	05	01	2.06	01	Penyediaaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Indikator out put sub kegiatan yaitu Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang di sediakan sebanyak 8 jenis setiap triwulannya dan terealisasi 7 jenis yaitu Balon Lampu, Kabel, Fitting Lampu, Terminal, Steker dan trafo, dengan realisasi kinerja 87,5%.	Dan disediakan anggaran s.d triwulan II sebesar Rp 6.312.500,- dan realisasi keuangan Rp 945.000,- (15,02%). Terdapat SPJ senilai Rp 3.728.000,- yang baru akan diGU-kan awal Juli 2024. Pada dasarnya penggunaan anggaran disesuaikan dengan kebutuhan kantor	Agar PPTK segera merampungkan SPJ pertanggungjawaban keuangan untuk direalisasikan
1	05	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Indikator output sub kegiatan adalah Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan dengan target sebanyak 20 jenis setiap triwulan, dan terealisasi 16 jenis yaitu BBM operasional 1 jenis dan 15 jenis alat dan bahan kebersihan dengan persentase capaian kinerja 80%.	Disediakan anggaran s.d triwulan II sebesar Rp 12.497.250,- terdiri dari belanja BBM/Pelumas Rp 8.703.500,- dan belanja alat dan bahan pembersih Rp 3.793.750,- Realisasi keuangan Rp 6.100.000,- atau sebesar 48,81%. Terdapat SPJ senilai Rp 3.235.000,- yang baru akan diGU-kan awal Juli 2024.Penggunaan anggaran disesuaikan dengan kebutuhan kantor	Agar PPTK segera merampungkan SPJ pertanggungjawaban keuangan untuk direalisasikan

1	05	01	2.06	05	Penyediaaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Indikator output sub kegiatan adalah Jumlah Barang cetakan dan/atau penggandaan yang disediakan sebanyak 3 jenis setiap triwulan, dan terealisasi 100% yaitu cetak, jilid dan penggandaan	Disediakan anggaran kas s.d triwulan II sebesar Rp 18.140.000,- Realisasi keuangan Rp 9.830.000 atau sebesar 54,19%. Terdapat SPJ Belanja Cetak Baliho, Spanduk & Banner senilai Rp 2.595.000,- yang baru akan diGU-kan pada awal Juli 2024	Agar PPTK segera merampungkan SPJ pertanggungjawaban keuangan untuk direalisasikan
1	05	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Indikator output sub kegiatan adalah Jumlah Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan, dan target s.d triwulan II sebanyak 30 expl dan realisasi30 expl yaitu koran lokal 6 expl, koran nasional 6 expl, koran regional 18 expl dengan capaian kinerja 100%	Disediakan anggaran kas s.d triwulan II sebesar Rp 3.360.000,- dan realisasi keuangan Rp 2.210.000,- atau sebesar 65,77%, hal ini karena masih terdapat penyedia koran yang belum melakukan penagihan.	Agar PPTK segera menghubungi penyedia untuk melakukan pembayaran.
1	05	01	2.06	08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Indikator output sub kegiatan adalah Jumlah tamu yang difasilitasi, dan target s.d triwulan II sebanyak 199 org dan terealisasi 195 org dengan capaian kinerja 97,98%	Disediakan anggaran kas s.d triwulan II sebesar Rp 11.000.000 dan realisasi keuangan masih 0% karena Terdapat SPJ senilai Rp 7.000.000 yang baru akan diGU- kan awal Juli 2024.	Agar PPTK segera merampungkan SPJ pertanggungjawaban keuangan untuk direalisasikan
1	05	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Indikator output sub kegiatan adalah Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diikuti, target s.d triwulan II sebanyak 26 kali dan realisasi 29 kali, capaian kinerja 111,5%.	Disediakan anggaran kas s.d triwulan II sebesar Rp 195.817.120,- terdiri dari belanja jasa upah jasa sopir Rp 18.000.000 dan belanja perjalanan dinas Rp 183.616.689,- dan realisasi keuangan 93,77%.	
1	05	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
1	05	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Indikator sub kegiatan adalah Jumlah mebel yang diadakan sebanyak 4 unit. Berdasarkan anggaran kas, pengadaan mebel direncanakan pada triwulan II TA. 2024, namun belum terealisasi karena terkendala spek yang belum tersedia di ecatalog. Dan saat ini dalam proses pencarian jenis barang dan penyedia dalam e-catalog lokal	Disediakan anggaran kas s.d triwulan II sebesar Rp 26.500.000, yaitu belanja Filling Kabinet dan Lemari arsip dan realisasi keuangan masih 0%	Agar PPTK mencermati anggaran kas yang telah direncanakan serta pemenuhan target kinerja sesuai rencana aksi dan percepatan realisasi belanja melalui e-catalog
1	05	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Indikator sub kegiatan adalah Jumlah Peralatan/Mesin Lainnya yang diadakan sebanyak 4 unit. Berdasarkan anggaran kas maka Pengadaan BM. Pengadan Peralatan dan mesin direncanakan pada Triwulan II TA. 2024. Berdasarkan anggaran kas, sub kegiatan ini direncanakan pada Triwulan II TA. 2024, dan saat ini masih dalam proses pencarian penyedia dan jenis barang sesuai TKDN dalam e-catalog Nasional	Disediakan anggaran kas s.d triwulan II sebesar Rp 59.000.000, yaitu belanja Komputer PC Rp 54.000.000,-dan belanja alat pembersih mesin babat Rp. 5.000.000 dan realisasi keuangan masih 0%.	Agar PPTK mencermati anggaran kas yang telah direncanakan serta pemenuhan target kinerja sesuai rencana aksi dan percepatan realisasi belanja melalui e-catalog
1	05	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Indikator sub kegiatan adalah Jumlah kendaraan dinas yang diadakan sebanyak 1 unit. Dan realisasi 1 unit (100%)		
1	05	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Indikator sub kegiatan adalah umlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan sebanyak 3 unit. Dan realisasi 3 unit Pengadaan AC 1 PK = 1 unit dan AC 1/2 PK = 2 unit	Disediakan anggaran kas pada triwulan II sebesar Rp 17.000.000,yaitu belanja alat pendingin AC Rp. 17.000.000 dan realisasi sebesar Rp. 15.600.000 atau sebesar 91,76%. Terdapat sisa kontrak sebesar Rp 400.000.	Agar PPTK mencermati sisa SPK/Kontrak untuk disesuaikan pada saat perubahan anggaran.
1	05	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
1	05	01		11	Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	kantor atau bangunan lainnya yang diadakan sebanyak 3 unit. Dan realisasi 3 unit Pengadaan AC 1 PK = 1 unit dan AC	pendingin AC Rp. 17.000.000 dan realisasi sebesar Rp. 15.600.000 atau sebesar 91,76%. Terdapat sisa kontrak	sisa SPK/Kontrak ur disesuaikan pada sa

1	05	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Indikator out put sub kegiatan adalah Jumlah surat masuk dan keluar yang diadministrasikan, dan target s.d triwulan Il sebanyak 200 surat dan realisasi 145 surat dengan persentase capaian kinerja 72,5%. Capaian kinerja disesuaikan dengan jumlah surat yang dikeluarkan maupun yang diterima.	Disediakan anggaran s.d triwulan II sebesar Rp 3.043.970,- terdiri dari Belanja ATK Rp 1.475.340,-, Belanja kertas & cover Rp 462.630,-, Belanja Benda Pos Rp 500.000,-, Belanja Bahan Komputer Rp 456.000,- dan paket/pengiriman Rp 150.000, dan Realisasi keuangan Rp 1.726.000 atau sebesar 56,70%.Terdapat belanja E-Catalog senilai Rp 679.395 yang baru akan diGU-kan awal Juli 2024, sedangkan untuk belanja paket/pengiriman disesuaikan	Agar PPTK melakukan percepatan proses belanja e-catalog dan segera merampungkan SPJ pertanggungjawaban keuangan untuk direalisasikan
1	05	01	2.08	02	Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Indikator output sub kegiatan adalah Jumlah rekening telepon, listrik dan air yang terbayarkan, dan target s.d triwulan Il sebanyak 18 rekening dan realisasi 22 rekening yaitu Listrik BPBD 6 rek, Token Listrik 3 rek, Air kantor 6 rek, kartu halo 6 rek. Capaian kinerja sebesar 122,2%	dengan kebutuhan kantor Disediakan anggaran s.d triwulan II sebesar Rp 27.910.344,- terdiri dari belanja Telepon Rp 900.000,- belanja air Rp 3.002.400,- dan belanja listrik Rp 24.007.944 .Realisasi keuangan Rp 17.801.664 atau 63,78% . Realisasi keuangan sifatnya Riil Cost	
1	05	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Indikator out put sub kegiatan adalah Jumlah jasa tenaga pelayanan umum kantor yang dibayarkan sebanyak 2 orang setiap triwulan. Sedangkan realisasi s.d triwulan II sebanyak 2 org dengan capaian kinerja 100%.	Disediakan anggaran s.d triwulan II sebesar Rp 9.900.000, Terdiri dari Honor pejabat pengadaan Rp 2.400.000 dan belanja honor upah jasa cleaning service honor Rp 7.500.000. Realisasi keuangan Rp 7.850.000 atau 79,29%. Terdapat sisa anggaran karena Pembayaran Gaji Bulan Juni untuk Cleaning service baru diLS-kan pada Awal Juli 2024 sedangkan Honor Pejabat Pengadaan bulan Juni baru diLS-kan awal Juli 2024	
1	05	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Umum Pemerintahan Daerah			
1	05	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Indikator out put sub kegiatan Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dengan target 13 unit setiap triwulan dan realisasi s.d triwulan II sebanyak 9 unit yaitu Mobil DD 8152 Kampas Koplen, master rem . Mobil DD 5153 Aki. Mobil Dinas DD 8170 dan Mobil Truk Serbaguna DD8153= 2 unit, Kendaraan Roda dua = 5 unit. Capaian kurang dari target disebabkan karena pemeliharaan kendaraan ini hanya dilakukan untuk kendaraan dinas yang memerlukan perbaikan.	Disediakan anggaran s.d triwulan II sebesar Rp 51.400.000,- terdiri dari belanja jasa pemeliharaan kendaraan perorangan Rp 6.400.000,- belanja jasa pemeliharaan kendaraan penumpang Rp 45.000.000,- Realisasi keuangan Rp. 22.905.000,- atau 44,56%. Penggunaan anggaran disesuaikan dengan kondisi kendaraan dinas yang memerlukan perbaikan	Agar PPTK tetap mengidentifikasi kondisi kendaraan dinas agar siap pakai

1	05	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Indikator out put sub kegiatan adalah Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara dengan target s.d triwulan II sebanyak 16 unit dan terealisasi 15 unit yaitu Tenda 1 unit, Printer 3 unit, Laptop 2 unit, Komputer 1 unit, Perahu karet 3 unit, chainsaw 5 unit, mesin babat 1 unit dengan persentase capaian kinerja 93,75%. Pemeliharaan peralatan disesuaikan dengan kondisi peralatan.	Disediakan anggaran s.d triwulan II sebesar Rp 12.701.000,- belanja pemeliharaan genset Rp 2.925.000,-, belanja pemeliharaan perahu karet Rp 910.000,-, belanja Pemeliharaan Alat Kantor Lainnya Rp 1.820.000, belanja pemeliharaan AC Rp 1.950.000, belanja pemeliharaan personal komputer Rp 3.796.000,- dan belanja pemeliharaan printer Rp 1.300.000, Realisasi keuangan Rp. 1.350.000 atau sebesar 10,63%. Realisasi masih rendah karena terdapat SPJ senilai Rp 3.605.000,- yang baru akan di GU-kan pada awal Juli. Pada dasarnya Penggunaan anggaran disesuaikan dengan peralatan kantor yang mengalami perbaikan	Agar PPTK segera merampungkan SPJ pertanggungjawaban keuangan untuk direalisasikan
1	05	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Indikator out put sub kegiatan adalah Jumlah gedung kantor dan/atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi setiap triwulan sebanyak 1 unit dan realisasi kinerja masih 100%. Kegiatan yang dilakukan adalah pengecetan pagar kantor. Pemeliharaan gedung kantor disesuaikan kondisi gedung kantor yang memerlukan perbaikan/pemeliharaan.	Disediakan anggaran s.d triwulan II sebesar Rp 6.000.000,- Realisasi keuangan Rp. 5.644.000% atau 94,07%	Agar PPTK tetap mengidentifikasi kondisi gedung kantor
1	05	03			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA			
1	05 05	03	2.01	02	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Indikator output sub kegiatan adalah Jumlah peserta sosialisasi kebencanaan dengan target 250 org. Berdasarkan anggaran kas maka sub kegiatan ini akan dilaksanakan pada Triwulan II TA. 2024, kegiatan tersebut belum dilaksanakan karena baru selesai didisposisi pada bulan Juni bertepatan dengan libur sekolah dan sasaran untuk sosialisasi adalah Pelajar Tingkat SMP/SMA dan untuk papan himbauan peringatan dini bencana masih dalam tahap administrasi	Berdasarkan Anggaran Kas Tahun 2024 kegiatan yang dilaksanakan pada Triwulan II sebesar Rp. 116.395.070,- namun realisasi keuangan masih 0%.	Agar PPTK mencermati anggaran kas yang telah direncanakan serta pemenuhan target kinerja sesuai rencana aksi
1	05	03	2.02		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana			
1	05	01	2.02	02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Indikator output sub kegiatan adalah Jumlah aparatur dan warga Negara yang ikut pelatihan, dengan target sebanyak 100 orang. Berdasarkan anggaran kas maka sub kegiatan ini akan dilaksanakan pada Triwulan III TA. 2024	Berdasarkan Anggaran Kas, sub kegiatan direncanakan pelaksanaannya pada Triwulan III TA. 2024 dengan pagu anggaran sebesar Rp. 61.020.750.,	Agar PPTK melaksanakan kegiatan sesuai rencana aksi
1	05	01	2.02	03	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasaranan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Indikator output sub kegiatan adalah Jumlah sarana prasarana penanggulangan bencana yang diadakan dengan target 77 unit. Berdasarkan anggaran kas maka sub kegiatan ini akan dilaksanakan pada Triwulan II TA. 2024, namun tertunda karena akan dilakukan perubahan rekening belanja sehingga menunggu perubahan anggaran	Disediakan anggaran kas s.d Triwulan II sebesar Rp. 65.750.000,- namun belum realisasi menunggu perubahan anggaran.	Agar PPTK melakukan perbaikan rekening belanja modal pada saat perubahan anggaran

1	05	01	2.02	06	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Indikator output sub kegiatan adalah Jumlah desa tangguh bencana yang dibentuk, dengan target sebanyak 4 desa. Berdasarkan anggaran kas maka sub kegiatan ini akan dilaksanakan pada Triwulan III TA. 2024	Berdasarkan Anggaran Kas, sub kegiatan direncanakan pelaksanaannya pada Triwulan III TA. 2024 dengan pagu anggaran sebesar Rp. 57.937.060,	Agar PPTK melaksanakan kegiatan sesuai rencana aksi
1	05	01	2.02	08	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Indikator output sub kegiatan adalah Jumlah Tim Reaksi Cepat yang di diklat, dengan target sebanyak 50 orang, sub kegiatan ini akan direncanakan pada Triwulan II TA. 2024, kegiatan tersebut masih dalam tahap pengajuan nota dinas ke pimpinan.	Disediakan anggaran kas s.d triwulan II TA. 2024 sebesar Rp 35.877.450,- dan realisasi keuangan masih 0%.	Agar PPTK mencermati anggaran kas yang telah direncanakan serta pemenuhan target kinerja sesuai rencana aksi
1	05	01	2.02	10	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Indikator output sub kegiatan adalah Jumlah warga negara yang ikut pelatihan dengan target 250 org dan realisasi 250 org dengan capaian kinerja 100%. sub kegiatan ini akan direncanakan pada Triwulan I TA. 2024, namun terealisasi pada Triwulan II TA. 2024. Sub kegiatan ini merupakan tindaklanji dari Kerjasama BPBD dan Tim Penggerak PKK Kab. Luwu Timur. Pelaksanaan gladi/simulasi diikuti oleh Tim Penggerak PKK Kab. Luwu Timur mulai dari tingkat desa, kecamatan dan kabupaten.	Disediakan anggaran kas sebesar Rp. 37.138.100,- realisasi keuangan Rp. 36.712.100,- atau sebesar 98,85%.	
1	05	03	2.03		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana			
1	05	01	2.03	02	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Indikator output adalah Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana dengan target 100% setiap triwulan dan terealisasi 100%. Dengan perhitungan bahwa semua kejadian bencana yang terjadi pada bulan Januari s.d Juni 2024 (138 kejadian), semuanya direspon kurang dari 24 jam ketika laporan diterima dan dilakukan kaji cepat.	Disediakan anggaran s.d triwulan II sebesar Rp 314.007.030,- Terealisasi sebesar Rp.219.613.400,- atau sebesar 70 % dari target anggaran sampai dengan Triwulan II,- yang belum di GU-kan. dan SPJ Belanja Perjalanan Dinas dalam daerah sebesar Rp 8.803.400,-, Gaji TRC Bulan Juni dan uang Jaga Sebesar Rp 43.860.000, Belanja BBM Rp. 596.000 dan Belanja Bahan Komputer Rp. 250.000,- Jadi Total SPJ yang belum ter GU kan sebesar Rp. 53.509.400,-	PPTK merampungkan SPJ keuangan
1	05	01	2.03	03	Pencarian,Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Indikator output adalah Persentase jumlah korban laki-laki dan perempuan berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi terhadap kejadian bencana dengan target 100% setiap triwulan dan terealisasi 100%. Dengan perhitungan bahwa jumlah korban bencana bulan januari s.d Juni 2024 sebanyak 356 jiwa (197 Laki-laki dan 159 Perempuan) dan semuanya diberikan layanan penyelamatan dan evakuasi	Disediakan anggaran s.d triwulan II sebesar Rp 23.071.000,- dengan realisasi sebesar Rp.4.658.000,- atau 20,19% dari anggaran kas Triwulan II, Namun masih terdapat SPJ perjalanan Dinas Dalam Daerah Rp. 20.272.700,- dan Belanja Bahan Bakar Minyak/pelumas yang belum di GU-kan sebesar Rp.1.000.000,- dan Makan minum aktifitas lapangan Rp. 750.000,- sehingga belum terealisasi sebesar 100 % dari target anggaran kas.	PPTK merampungkan SPJ keuangan

1	05	01	2.03	04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Indikator output adalah Persentase jumlah korban bencana laki-laki dan perempuan yang terfasilitasi kebutuhan dasarnya yang responsif gender dengan target 100% setiap triwulan dan terealisasi 100%. Dengan perhitungan bahwa jumlah korban bencana pada bulanjanuari s.d Juni 2024 sebanyak 356 jiwa (197 Lakilaki dan 159 Perempuan) dan semuanya terlayani bantuan logistik baik itu berupa sandang pangan dan hunian sementara (tenda) bagi yang memenuhi syarat untuk diberikan bantuan.	Disediakan anggaran s.d triwulan II sebesar Rp. 24.180.000- dengan realisasi sebesar Rp. 7.813.000,- atau 32.31% dari target anggaran kas pada triwulan II. Namun masih terdapat SPJ perjalanan Dinas dalam daerah yang belum di GU-kan sebesar Rp. 23.079.750,-, Belanja perjalanan Dinas Luar daerah luar provinsi sebesar Rp. 7.150.000,-, Belanja persediaan Rp. 1.400.000,- dan Belanja Bahan Komputer sebesar Rp. 580.000,- Sehingga Total SPJ Belanja yang belum ter GU kan sebesar Rp. 32.209.750,-	PPTK merampungkan SPJ keuangan
1	05	01	2.03	05	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Indikator Output adalah Persentase jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana dengan target 100% setiap triwulan dan terealisasi 100%. Dengan perhitungan bahwa kooridnasi sistem komando oleh pusdalops penanggulangan bencana dalam penyiapan petugas penanganan darurat bencana pada bulan januari s.d Juni 2024 sebanyak 36 personil dan semuanya aktif dalam penanggulangan bencana	Disediakan anggaran pada triwulan II sebesar Rp 16.397.040,- Namun realisasi keuangan sampai pada triwulan II masih 0%, hal ini disebabkan karena anggaran sifatnya disediakan dan tidak terdapat kejadian bencana yang membutuhkan aktivasi sistem komando penanganan darurat.	PPTK melaksanakan sub kegiatan sesuai ketentuan yang berlaku.
1	05	01	2.03	06	Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit	Indikator output adalah Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status kejadian luar biasa wabah penyakit dengan target 100% setiap triwulan dan terealisasi 100%. Dengan perhitungan bahwa bencana non alam yang ditangani oleh BPBD terkait giat pemulasaran jenazah covid-19, semuanya direspon kurang dari 24 jam. pada periode Triwulan II tidak ada laporan Masyarakat yang terkonfirmasi covid-19 (meninggal) atau akibat pandemi lain dan akibat gagal teknologi yang diterima oleh TRC BPBD.	Dan disediakan anggaran s.d triwulan II sebesar Rp 9.853.800,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp 0,- hal ini disebabkan karena sampai dengan triwulan II tahun 2024 tidak ada kejadian akibat Covid 19 dan bencana wabah penyakit lainnya atau akibat gagal teknologi.	PPTK melaksanakan sub kegiatan sesuai ketentuan yang berlaku.
1	05	03	2.04		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana			
1	05	03	2.04	01	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Indikator Sub Kegiatan adalah Jumlah regulasi penanggulangan bencana Kabupaten/Kota yang disusun sebanyak 3 dokumen. Berdasarkan anggaran kas, sub kegiatan direncanakan pada Triwulan III TA. 2022	Disediakan anggaran kas s.d triwulan II sebesar Rp. 11.539.860,- namun realisasi keuangan masih 0%. Berdasarkan anggaran kas, penyusunan Perbup dan SOP direncanakan pada triwulan II s.d III, dan terkait dengan penyusunan perbup RPB dan KRB, saat ini rekomendasi RPB telah terbit sedangkan KRB masih menunggu rekomendasi dari BNPB. Sedangkan beberapa SOP masih dalam proses penyusunan.	Agar PPTK mencermati anggaran kas yang telah direncanakan serta pemenuhan target kinerja sesuai rencana aksi

1	05	03	2.04	02	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	Indikator Sub Kegiatan adalah Jumlah Forum PRB yang dibentuk dan difasilitasi sebanyak 1 Forum. Berdasarkan anggaran kas, sub kegiatan direncanakan pada Triwulan II & III TA. 2024	Disediakan anggaran kas s.d triwulan II sebesar Rp. 29.969.580,- namun realisasi keuangan masih 0%. Berdasarkan anggaran kas, direncanakan pelaksanaan sub kegiatan pada triwulan II s.d III, dan saat ini SK Forum PRB dalam proses perbaikan struktur forum sedangkan untuk penilaian IKD kan dilaksanakan pada bulan September.	Agar PPTK mencermati anggaran kas yang telah direncanakan serta pemenuhan target kinerja sesuai rencana aksi
1	05	01	2.02	07	Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota	Terget output sub kegiatan pada triwulan Il yaitu tersusunnya dokumen Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana sebanyak 1 dokumen dan terealisasi 100%	Anggaran kas sampai dengan TW 2 Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor ATK sebesar Rp. 605.380, realisasi sebesar Rp. 582.600,-, belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Kertas dan Cover Dan disediakan anggaran pada Triwulan II sebesar Rp 53.280.000,- yang terdiri dari Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak, Belanja Makanan dan Minuman Rapat, Belanja Perjalanan Dinas Biasa, Belanja Modal Jembatan pada Jalan Desa, dan Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam. Adapun Realisasi keuangan sebesar 15.64% yaitu perjalanan dinas biasa. sedangkan untuk makan minum rapat disesuaikan dengan kegiatan, serta belanja Modal Jembatan pada Jalan Desa, dan Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam belum terealisasi dikarenakan menunggu RPMK tentang dana hibah dari Kementerian Keuangan untuk pelaksanaan dana hibah Rehabilitasi Rekonstruksi.	Agar PPTK segera merampungkan SPJ administrasi keuangan agar dapat segera terealisasi kinerja dan keuangan. Dan tetap mengawal dana hibah RR tersebut

BAB 4

PENUTUP

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Luwu Timur telah menetapkan 2 (dua) sasaran strategis dan 1 sasaran pendukung yang didasarkan pada tujuan, sasaran strategis dan target kinerja yang telah ditetapkan baik pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026, serta Rencana Strategis (Renstra) BPBD Tahun 2021-2026.

Secara umum hasil pelaksanaan program dan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur dalam pencapaian sasaran pada Triwulan II Tahun 2024, dapat disimpulkan sebagai berikut :

- a. Realisasi Anggaran belanja APBD Triwulan II Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp. 2.102.529.990,- (62,51%) yang terdiri dari Belanja Pegawai Rp. 975.145.558,- (28,99%) dan Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 566.284.432,- (16,84%) dan Belanja Modal Rp 561.100.000,- (16,68%).
- b. Persentase Capaian Kinerja sasaran strategis I dengan indikator Indeks Ketahanan Daerah yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Badan Penanggulangan bencana Daerah Triwulan II Tahun 2024 sebesar 98,36% dengan predikat BAIK.
- c. Persentase Capaian Kinerja sasaran strategis II yaitu Indeks Capaian SPM Sub Urusan Bencana yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Badan Penanggulangan bencana Daerah Target Tahun 2024 sebesar 100% dengan realisasi 37,52% predikat KURANG
- d. Persentase Capaian Kinerja sasaran III (sasaran pendukung) yaitu Nilai SAKIP yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Badan Penanggulangan bencana Daerah Triwulan II Tahun 2024 sebesar 103,5%, dengan <u>predikat BAIK</u>.
- e. Persentase Capaian Kinerja Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana berdasarkan jenis pelayanan dasar yaitu :
 - Pelayanan Informasi Rawan Bencana: 65,63%
 - Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana: 13,05%
 - Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana : 33,87%

- f. Faktor yang menjadi penghambat pencapaian kinerja Triwulan II Tahun 2024 terhadap beberapa target sasaran Badan Penganggulangan Bencana Daerah Kab. Luwu Timur yaitu:
 - Pelaksanaan program/kegiatan tidak sesuai rencana aksi dan anggaran kas yang telah ditetapkan
 - Keterlambatan proses E-Catalog
 - Pengolahan data dan informasi pada lingkup bidang yang belum maksimal
 - Terdapat beberapa kegiatan yang sifatnya disediakan sehingga penggunaan anggarannya disesuaikan dengan kondisi atau kejadian bencana
 - Terdapat papan himbauan peringatan dini bencana yang rusak berat sehingga berdampak kepada capaian SPM Pelayanan informasi rawan bencana yang kurang dari 100%
 - Terdapat perbedaan persepsi terkait penetapan target triwulanan dan tahunan pada saat penginputan aplikasi SPM Sub Urusan Bencana sehingga terjadi perubahan target.
- g. Adapun rekomendasi terkait peningkatan kinerja di masa mendatang yang perlu ditindaklanjuti oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Luwu Timur adalah sebagai berikut :
 - Pelaksanaan program/kegiatan sesuai rencana aksi
 - Percepatan proses pengadaan melalui E-Catalog
 - Meningkatkan monitoring dan evaluasi terhadap perjanjian kinerja secara berjenjang di tingkat SKPD
 - Meningkatkan peran serta masyarakat, swasta, organisasi masyarakat, dan lembaga-lembaga pemerhati lingkungan dalam rangka penanggulangan bencana dalam rangka pencapaian SPM Sub Urusan Bencana
 - Memaksimalkan penyebaran informasi kebencanaan melalui media sosial
 - Memaksimalkan pengolahan data dan informasi lingkup OPD
 - Mencermati /kegiatan yang sifatnya disediakan untuk mengatisipasi SILPA program diakhir tahun
 - Memprioritaskan program/kegiatan pengampuh Standar Pelayanan Minimal (SPM) Penanggulangan Bencana
 - Mencermati penetapan target tahunan dan triwulanan SPM
 - Meningkatkan koordinasi lintas sektoral terkait penanggulangan bencana.

Akhirnya dengan disusunnya Laporan Kinerja Triwulan II Tahun 2024 diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan kepada seluruh pihak terkait pelaksanaan tugas fungsi BPBD Kabupaten Luwu Timur, sehingga dapat memberikan umpan balik guna peningkatan kinerja organisasi terhadap perkembangan tuntutan stakeholders, sehingga kontribusi **BPBD** dalam pembangunan dapat lebih dirasakan manfaatnya.

Malili, 10 Juli 2024

NTAH KEPALA PELAKSANA,

, M. Kes

angkat : Pembina Utama Muda WU TMP 19670707 200012 1 002

LAMPIRAN 1 TINDAK LANJUT LHE KEMENTERIAN PAN-RB

Matriks Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2023

No.	Rekomendasi	Rencana Aksi Tindak lanjut	Status/Progress Penyelesaian
1.		Perbaikan Dokumen	Selesai
		Renstra Bab IV Tujuan	
		dan Sasaran (Rumusan	
	perencanaan mengacu pada	tujuan dan sasaran telah	
	isu strategis yang tertuang dlm		
	dokumen perencanaan	indikator dan defenisi	
		operasional	
2.	Memperbaiki kualitas	Perbaikan Pohon Kinerja,	Selesai
	penjenjangan kinerja OPD	mulai dari kinerja sasaran	
	dan memastikan bahwa	strategis, kinerja urusan,	
	penjenjangan kinerja memiliki	kinerja taktikal sampai	
	hubungan kausalitas dengan	kinerja operasional	
	mempertimbangkan CSF		
	disetiap level sampai level		
	operasional		
3.	Memastikan penetapan	Perbaikan Target kinerja	Selesai
	target kinerja dalam	pada Perjanjian Kinerja	
	dokumen perencanaan	Tahun 2024	
	tahun berikutnya mengacu		
	kepada capaian tahun		
	sebelumnya		
4.	Melengkapi dokumen IKU	Perbaikan Dokumen IKU	Selesai
	dengan memberikan defenisi	dan telah dilengkapi	
	operasional dan penjelasan	dengan penjelasan	
	detil formulasi perhitungan	operasional dan formulasi	
		perhitungan	

5.	Meningkatkan kualitas LKJ	Perbaikan Dokumen LKJ	Selesai
	dengan memperdalam	Tahun 2023 disertai analisis	
	analisis capaian kinerja serta	dan dilengkapi dengan data	
	memberikan data dan bukti	dan bukti	
	dukung	dukung/dokumentasi	
		pelaksanaan kegiatan	
6.	Pemanfaatan informasi pada	Perbaikan Target kinerja	Selesai
	laporan kinerja sebagai	pada dokumen Perjanjian	
	masukan dalam perencanaan	Kinerja Eselon II (Target	
	tahun berikutnya seperti	melebihi capain tahun	
	penetapan target yang lebih	sebelumnya	
	baik		

LAMPIRAN 2 TINDAK LANJUT LHE INSPEKTORAT TAHUN 2022

Matriks Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah Badan Penanggulangan Bencana Daerah

No.	Rekomendasi	Rencana Aksi Tindak lanjut	Status/Progress Penyelesaian
1.	Membuat target kinerja yang	Penetapan target kinerja	Selesai
	lebih menantang namun	telah mempertimbangkan	
	diyakini dapat dicapai	capaian kinerja tahun	
		sebelumnya untuk dijadikan	
		sebagai dasar dalam	
		menentukan besaran target.	
2.	Setiap pegawai (staf dan	Perencanaan kinerja atasan	Selesai
	fungsional) merumuskan dan	telah diturunkan ke	
	menetapkan perencanaan	perencanaan kinerja	
	kinerja selaras dengan PK	staf/bawahan	
	atasannya setiap awal tahun		
3.	Laporan Kinerja menginfokan	Laporan LKj telah	Selesai
	perbandingan realisasi	menginformasikan	
	kinerja dengan realiasi	perbandingan realisasi kinerja	
	kinerja di level	dengan target nasional (SPM)	
	nasional/internasional		
	(Benchmark Kinerja)		
4.	Analisis yang disampaikan	Analisis yang dituangkan	Selesai
	dalam laporan kinerja	dalam Laporan Kinerja telah	
	menghasilkan umpan balik	menghasilkan umpan balik	
	berupa perbaikan atas	berupa perbaikan	
	perencanaan kinerja dan	perencanaan kinerja dan	
	strategi dalam	strategi utamanya adalah	
	pencapaiannya	Indikator Kinerja Utama OPD.	
		(Indeks Risiko Bencana dan	
		Indeks Ketahanan Daerah)	

5.	Evaluasi pengukuran kinerja	Dalam Lkj telah dijelaskan	Selesai
	per triwulan, selain	efektifitas atau keberhasilan	
	menganalis capaian kinerja	dalam Pencapaian Indikator	
	dan efesiensi kinerja, juga	Kinerja Tujuan dan Sasaran	
	seharusnya mengukur tingkat	OPD melalui Pelaksanaan	
	efektifitas pelaksanaan	Program Penanggulangan	
	kegiatan penunjang	Bencana	
	keberhasilan program		